PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA KABUPATEN MANDAILING NATAL DI KEC. PANYABUNGAN TAHUN 2020 (STUDI KOMUNIKASI POLITIK)

SKRIPSI

Oleh

Nurhikma Hayati

Nim: 0105171011

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA KABUPATEN MANDAILING NATAL DI KEC. PANYABUNGAN TAHUN 2020 (STUDI KOMUNIKASI POLITIK)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk Memenuhi Salah Satu Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I. KOM)

Oleh

Nurhikma Hayati
Nim 0105171011

Pembimbing I

Dr. Abdul Rasyid, M.A
NIDN. 2002046401

Pembimbing II

Dra. Zuhria, M.A
NIDN. 200906630

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Dr. Muhammad Alfikri, M.Si
NIDN. 2023028301

PRODI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERISTAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Permohonan Sidang

Lamp : 1 Buah Penelitian Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara

Di Medan

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing menyampaikan skripsi saudari:

Nama : Nurhikma Hayati

NIM : 0105171011

Skripsi yang berjudul : Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal di Ke. Panyabungan tahun 2020 (Studi Komunikasi Politik)"

Sudah dapat diajukan pada Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara (S1) dalam sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.KOM).

Dengan ini kami mengharapkan agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di Munaqasyahkan. Atas perhatian nya kami ucapkan terima kasih.

Medan, 14 Januri 2022

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Abdul Rasyid, M.A	**Dra. Zuhria, M.A**
NIDN. 2002046401	**NIDN. 2009066301**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjuduk **"Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Di Kec. Panyabungan Tahun 2020 (Studi Komunikasi Politik) "** a.n Nurhikma Hayati, Nim. 0105171011 Program Studi Ilmu Komunikasi telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqaysah Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan Pada tanggal 31 Januari 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh sarjana Ilmu Komunikasi (S.I. Kom) pada Program Studi Ilmu Komunikasi.

Medan, 14 Maret 2022

Dewan Penguji

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi	Sekretaris
Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos, M.Si	Dr. Sholihah Titin Sumanti, M.Ag
NIDN. 2023028301	NIDN. 2013067301

Anggota

Penguji I	Penguji II
Dr. Fahrur Rozi, M.I.Kom	Dra. Achiriah, M.Hum
NIDN. 2018118303	NIDN. 2010106303
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Abdul Rasyid, M.A	Dra. Zuhriah, M.A
NIDN. 2002046401	NIDN. 2009066301

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial UINSU Medan

Dr. Maraimbang Daulay, M.A
NIP . 196906291997031003

LEMBAR VALIDASI

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA KABUPATEN MANDAILING NATAL DI KEC. PANYABUNGAN TAHUN 2020 (STUDI KOMUNIKASI POLITIK)

OLEH:

NURHIKMA HAYATI

NIM 0105171011

Telah disidangkan pada tanggal 31 Januari 2022 di Program Srudi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan:

Dosen Penguji

1. Dr. Fahrur Rozi, M.I.Kom
   BLU. 1100000087 .....

2. Dra. Achriah, M.Hum
   Nip. 196310101994032001 .....

Dosen Pembimbing

1. Dr. Abdul Rasyid, M.A .....
   BLU. 1100000086

2. Dra. Zuhriah, M.A .....
   Nip. 196306092014112001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhikma Hayati

NIM : 0105171011

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul Skripsi : **Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal di Kec. Panyabungan Tahun 2020 (Studi Komunikasi Politik).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 14 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

Nurhikma Hayati

0105171011

ABSTRAK

Nama : Nurhikma Hayati

NIM : 0105171011

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal di Kec. Panyabungan Tahun 2020 (Studi Komunikasi Politik).

Pembimbing 1 : Dr. Rasyid, M.A

Pembimbing II: Dra. Zuhria, M.A

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada Pilkada kabupaten Mandailing Natal, mengetahui pesan-pesan pilkada yang disampaikan KPU melibatkan kelompok referensi, mengetahui media yang digunakan KPU dalam sosialisasi Pilkada, serta mengetahui pesan menyentuh atau menarik perhatian masyarakat ikut Pilkada. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif (Descriptive Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan menjadi 70% di bandingkan tahun 2015 hanya 56%, masyarakat Mandailing natal ikut berpartisipasi karena adanya dorongan dari kata hati, kesadaran diri sendiri, adapula karena suatu hal alasan tertentu. Terselenggaranya pemilihan kepala daerah ini tidak terlepas dari tanggung jawab KPU Madina dan juga kesediaan seluruh stakeholder maupun elemen masyarakat yang menjadi perpanjang tangan KPU Madina untuk sosialisai dalam mensukseskan Pilkada ini yakni salah satunya terlibatnya kelompok referensi, selain itu KPU Madina juga berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat tidak ketinggalan informasi terkait segala bentuk informasi tentang Pilkada disebar maka KPU juga menggunakan sosialisasi melalui berbagai media.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pilkada, Komunikasi Politik

MOTTO

... dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahma Allah,
melainkan kaum kafir. (Q.S Yusuf:87)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat tiada henti nya yang engkau karuniakan kepada hamba mu ini akhirnya hamba bisa menyelesaikan Skripsi ini, rasa syukur hamba ucapkan kepada mu atas ridho-mu ya rabb, insan yang tak luput dari segala kekurangannya.

Kupersembahkan hadiah terindah ini untuk kalian sebagai tanda terimakasih dan bakti ku untuk Ibu dan Alm. Ayah yang selalu mendoakan serta keluarga besar ku, mensupportku ku hingga tak bosan-bosannya juga selalu menasehati ku karena doa kalian dan cinta kasih kalian aku bisa mencapai semua ini. Tak lupa saya berterimakasih banyak yang kepada dosen pembimbing saya yang selama ini membimbing saya hingga bisa mencapai titik sekarang ini.

Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang..

Aamiin Ya Rabbal`alamin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunianya bisa melakukan berbagai macam aktivitas, terutama kepada saya selaku penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagimana yang di harapkan.

Dan tidak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang memanusiakan manusia, hal ini sangat penting untuk kita semua sebagai umat muslim. Penulisan Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.IKOM) pada Fakultas Ilmu Sosilal UIN Sumatera Utara. Adapun skripsi ini berjudul " **Partisipasi Masyarakat pada Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal di Kec. Panyabungan Tahun 2020 (Studi Komunikasi Politik)**"

Dalam penyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari beberapa pihak. Perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terimasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dapat membantu dan mendukung penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu penulis juga dengan sepenuh hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa khususnya orang yang sangat saya cintai dan kasihi dengan sepenuh hati. Penulis sampaikan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu Ibunda tercinta Kholidah Hannum dan Alm. Ayahanda tercinta Ahmad Subir, dan adek-adek ku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan yang sangat luar biasa dan nasehat nya kepada penulis serta do`a tulus yang tiada henti selalu tercurahkan untuk kesuksesan penulis, sehingga penulis mampu mengahadapi segala kesulitan maupun hambatan. Dan Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof, Dr. Syahrin Harahap, MA selaku rektor UIN Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Marimbang Daulay, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Al Fikri Matondang, S.Sos, M,Si selaku ketua Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Sholihah Titin Sumanti, M.Ag selaku sektaris Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Abdul Rasyid, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Zuhriah, M.A selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu serta Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera yang telah banyak memberikan pelayanan, bantuan maupun mendidik penulis selama mengikuti perkulihan.
9. Bapak fadillah, bapak husein lubis, Bapak Yasir Nasution, Bapak Akhir mada, Bapak Ikhsan dan Bapak Irfan serta staf lainnya dari KPUD Kabupaten Mandailing Natal yang telah meluangkan waktu penulis melakukan wawancara dan memberikan penulis data dan informasi yang akurat tentang penyelenggaran dan juga sebagi tempat penulis melakukan penelitian.
10. Bapak Fahri Lubis, Bapak Sofyan, dan Bapak azwar yang telah meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara.
11. Teristimewa khususnya buat keluarga besar ku nenek, tulang, tante, udak, kakak maupun abang yang tak bosan-bosan nya membantu,mensuport, memotivasi, dukungan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat seperjuangan baik suka maupun duka yang sama-sama di perantauan orang Rizki Fadhillah yang senang hati membantu serta memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, juga tak bosan-bosannya memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat: Bg. Ganti, masdiana, fitri, ayu, cici, nina, devi, salmi, yusraini, fatimah, cindy, evi, bg. Ihsan dan teman di Ad-dakwah dan teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tidak bosan-bosan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan Program Studi Ilmu Komunikasi UIN SU stambuk 2017 terkhususnya kelas Jurnalis IKOM-2 yang telah berjuang menemani dan menyelesaikan mata kuliah bersama-sama dalam menempuh pendidikan beberapa tahun ini.

Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi mereka yang membantu penulis dalam semua hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh sebab iu penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi, penggunaan konsep, sistematikan maupun data penelitian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Medan, Juni 2021
Penulis,

Nurhikma Hayati
0105171011

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
LEMBAR VALIDASI ..... **iv**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Batasan Istilah 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
F. Sistematika Pembahasan 6
BABII KERANGKA TEORI **8**
A. Political Communication Theories 8
B. Komunikasi Politik 10
1. Unsur-unsur Komunikasi Politik 13
2. Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik 15
3. Fungsi dan Tujuan Komunikasi Politik 18
4. Saluran-saluran Komunikasi Politik 18
5. Peran Media Massa dalam Komunikasi Politik 19
C. Komunikasi Politik dalam Pemilukada 20
1. Pengertian Pemilukada 20
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilukada 21
3. Memilih Pemimpin dari sudut pandang Alquran dan Hadits 21
D. Penelitian terdahulu 24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 26
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 27
B. Lokasi dan Jadwal Penelitian 27
C. Jenis Sumber Data 29
D. Informant Penelitian 29
E. Teknik Pengumpulan Data 29
F. Teknik Analisis Data 30
G. Pengujian Keabsahan Data 31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 32
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 32
B. Partisipasi Pilkada Mandailing Natal tahun 2020 38
C. Data Informan 40
D. Pesan-Pesan Pilkada Yang Di Sampaikan KPU Melibatkan Kelompok Referensi 41
E. Media Yang Digunakan KPU Dalam Sosialisasi 50
F. Pesan Menyentuh Atau Menarik Perhatian Masyarakat ikut Pilkada 55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penelitian.....27
Tabel 2. Hasil Perolehan Suara.....37
Tabel 3. Data Tingkat Partisipasi Panyabungan Kota.....38
Tabel 4. Perbandingan Tingkat Parmas.....39
Tabel 5. Data Informan.....39

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Panyabungan adalah salah satu kota dari kecamatan Kabupaten Mandailing Natal di Provisi Sumatera Utara yang turut melaksanakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal yang diselenggarakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 tahun lalu sesuai yang memiliki kewajiban untuk menyelenggrakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal secara serentak Tahun 2020 sesuai peraturan dan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Waikota untuk menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1280).

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini tersebar di 23 kecamatan diseluruh 404 desa/kelurahan (sumut.ataranews.com: 2020) Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal ini menetapkan tiga calon pasangan kandidat yaitu pasangan kandidat yaitu pasangan calon nomor urut 1 H. Muhammad Jafar Sukhairi- Atika Azmi Utammi partai pengusung PKB-PKS-HANURA, kemudian pasangan calon urut nomor 2 Drs. H. Dahlan Hasan Nasution- H. Aswin Lubis partai pengusung PDI PERJUANGAN- GOLKAR-NASDEM- PERINDO- PPP PKPI- BERKARYA. Dan pasangan calon nomor urut 3 H. M. Sofwat Nasution- Ir. H. Zubeir Lubis parta pengusung GERINDRA-PAN- DEMOKRAT.

Masing-masing dari ketiga pasangan calon kandidat, untuk memperoleh dukungan masyarakat, mereka melakukan kampanye dan menyampaikan visi misi mereka serta program kerja untuk membangun Daerah Mandailing Natal yang Madani kedepannya dengan beragai media. Dan ini merupakan salah satu bagian komunikasi politik untuk menarik perhatian masyarakat, dengan adanya komunikasi politik ini. Komunikasi politik sangat berperan penting untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dan bisa membuka maindset mereka

dalam memilih calon yang baik di mata mereka sendiri. Michael dan philip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sitem sosial dengan sistem-sistem politik. proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pola pertukaran informasi diantara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada suatu tingkatan. (Asep Sentiawan, 2018:17)

Secara umum menurut burhan burgin (2018:174) untuk membangun keterlibatan pada pemilihan ini tentu tidak terlepas dari siklus komunikasi, komunikasi bagian yang paling penting dari semua sistem sosial di dalam masyarakat manusia, termasuk juga adalah politik. Dalam komunikasi politik fakta-fakta sosial selalu dihubungkan dengan peristiwa dan waktu dimana fakta sosial itu terjadi, pemahaman ini disingkat dengan istilah momentum baik dari pendekatan KPU Madina sendiri dengan stakholder ethok tingkat bawah yang menjadi perpanjang tangan untuk mesukseskan pemilihan kepala daerah.

Dilihat dari tinjauan fakta yang terjadi dilapangan yang dilihat oleh peneliti dalam pemilihan kepala daerah ini terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran sehingga merujuk berbagai faktor masalah pada saat pemilihan kepala daerah, karena berangkat dari masalah ini, kerap menjadi perbincangan yang sangat isu di tengah-tengah masyarakat bahkan isu ini sampai pada berbagai media sosial, kendati satu hari hasil sebelum pemilihan tiba terdengar kabar adanya banyak kecurangan maupun pelanggaran yang memengaruhi perolehan suara tidak lain *politik money*.

Politik uang sendiri sekalipun kondisi kampanye sama-sama tahu sudah rahasia umum sering terjadi seolah sudah lumrah di tengah-tangah masyarakat bahkan sudah membudaya yang dilakukan oleh para oknum kandidat pasangan calon pemilihan kepala daerah (pilkada), menyikapi hal ini tentu mendombrak jalannya demokrasi yang menjadi landasan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hakikatnya politik uang ini tidak lah mudah untuk diatasi maupun di hindari dari kalangan masyarakat karena politik uang bagaikan tradisi dan tidak bisa berkutip apapun.

Menyikapi hal ini menurut Adi Saputra (2021: https://news.detik.com/berita/d-5503161/mk-perintahkan-) walau sempat terjadi sengketa permasalahan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perolehan suara tidak sah akibat pelanggaran tadi maka diputuskan pemilihan suara ulang di 3 TPS yakni TPS 001 desa bandar panjang tuo kecamatan muara sipongi, serta TPS 001 dan 002 di kampung baru kecamatan panyabungan utara. Menyikapi hal ini tentu dalam pemilihan kepala daerah hal yang memengaruhi sistem demokrasi, tentunya dalam pemilihan pada hakikatnya rakyatlah pihak yang paling utama dalam menetukan hak pilih nya dalam memberikan suara secara langsung, keikutsertaan sebagai pemilih yang berwarga negara biasa mesti ikut berpartisipasi.

Dari data KPU Madina pada pemilihan kepala daerah kabupaten Mandailing Natal 2020 khususnya di panyabungan kota jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 56,142 pemilih, akan tetapi jika dihitung untuk keseluruhan di Kabupaten Mandailing Natal jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 305, 549 pemilih. Sejatinya pemilihan ini sebuah pilar mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Penentu masa depan Kabupaten Mandailing Natal terletak pada keputusan di tangan rakyat sendiri, dalam mewujudkan kemajuan daerah itu sendiri perlu adanya partisipasi serta dukungan yang sangat dibutuhkan sebagai wujud keikutsertaan, kebersamaan dan kerjasama.

Terlepas apapun motivasinya peran penting KPU Mandailing Natal selaku penyelenggara teknis tetap berupaya memaksimalkan munculnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terlepas apapun faktornya, peran KPU tetap mengedepankan bagaimana memancing kesadaran masyarakat secara sadar hati nurani mau menyalurkan hak pilihnya dan memilih calon kandidat yang menurut kita mana yang tepat. Tugas dari KPU tingkat kabupaten sebagai implementator sebagai kelembagaan sebagin organisasi hanya melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan baik dari Undang-undang maupun peraturan (Fadillah Syarief ketua KPU Madina).

Di luar itu secara personal keanggotaan KPU di tuntut tetap mengedepankan integritas, profesional dan tanggung jawab, di samping penyelenggara peserta pemilu pemilihan harus profesional baik dari partai

maupun pasangan calon pada saat kontestasi PILKADA lebih kompretif dan patuhi aturan main dan memahami posisi masing-masing, tidak akan ada persoalan yang berarti dalam pelaksanaan proses tahapan baik pemilu maupun pemilihan, pemahaman dan kedewasaan dalam menjalankan demokrasi perlu di benahi lagi dan jangan memenuhi hasrat ambisinya politik sehingga menghalalkan segala cara itu tidaklah benar, memberikan pemahaman dan pendekatan kepada masyarakat atau memberikan edukasi dengan cara sosialisasi karena ini tentu sangat penting untuk jalannya suatu pemilukada nantinya dalam pencegahan pelanggaran dan sekaligus mengantisipasi mencegah money politik pada pemilihan kepala daerah ini.

Sejatinya solusi peran kita dalam kegitaan pemilihan ini harus membuka pola pikir kita lebih matang lagi ketika pemilukada harus di upayakan demi membangun madina yang madani, keikutsertaan kita inilah jalan satu-satunya kita sebagai pilar mencerdaskan bangsa dan bernegara. Penentu masa depan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal lima tahun kedepan terletak pada keputusan di tangan kita sendiri, untuk mencari pemimpin yang layak, jujur, adil dan mampu mengayomi masyarakat demi mewujudkan kemajuan daerah. Mari bersama memupuk dan menjungjung tinggi nilai kebenaran bukan membenarkan kesalahan, hal ini sangat di butuhkan pada kesadaran pada diri sendiri dan harus bisa di ubah sedemikian mungkin dalam hal berpartisipasi.

Dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti sesuai dari uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengambil judul " Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal di Kec. Panyabungan Tahun 2020 (Studi Komunikasi Politik)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti membuat rumusan masalah sesuai kajian teori komunikasi politik yang menjadi pokok fokus pembahasan dalam penelitian ini, yakni:

Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal di Kec. Panyabungan Tahun 2020 (Studi Komunikasi Politik) yaitu:

1. Bagaimana pesan-pesan pilkada yang disampaikan KPU melibatkan kelompok referensi?
2. Media Apa yang digunakan KPU dalam Sosialisasi Pilkada?
3. Apakah ada pesan yang menyentuh atau menarik perhatian masyarakat ikut Pilkada?

C. Batasan Istilah

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan sekelompok orang atau individu yang terlibat ikut secara aktif dalam kehidupan kegiatan berpolitik, masyarakat bisa berpartisipasi dalam bentuk memilih pemimpin negara dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah adanya gerakan masyarakat untuk berpartisipasi.

2. Komunikasi Politik

Komunikasi politik atau *political communication* merupakan komunikasi yang melibatkan aktor-aktor politik dan pesan-pesan politik tentunya berkaitan dengan kekuasaan pemerintah serta kebijakan pemerintah. Inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat suatu kelompok atau warga tertentu. (Asep Sentiawan, 2018:17) pemaknaan komunikasi politik yang dimaksud penelitian ini adalah komunikasi politik KPU Madina pada penyelenggaraan PILKADA Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020.

3. Pilkada Kabupaten Mandailing Natal

Mandailing Natal adalah salah satu Kabupaten Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara yang turut melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Tahun 2020 sesuai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi 09 Desember 2020.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan pemekaran dari kabupaten Tapanulis Selatan dan berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021, penduduk Kabupaten ini berjumlah 489,569 jiwa,dengan kepadatan 80 jiwa/km^2. Adapun pemaknaan nya pada pilkada Kabupaten Mandailing Natal khususnya di kec. Panyabungan kota merupakan tempat lokasi atau objek sasaran peneliti dalam penelitian yang berkaitan dengan PILKADA Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pesan-pesan Pilkada yang disampaikan KPU melibatkan kelompok referensi.
2. Untuk mengetahui media yang digunakan KPU dalam Sosialisai Pilkada.
3. Untuk mengetahui Pesan yang menyentuh atau menarik perhatian masyarakat ikut pilkada.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi awal mula dalam kajian teoritis mengenai bagaimana partisipasi masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal di kec. Panyabungan tahun 2020 (Studi Komunikasi Politik) dan sebagai acuan referensi penelitian selajutnya dan menambah wawasan bagi para pembaca.
2. Secara praktis maka diharapkan pada hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan pemikiran yang bermanfaat bagi yang berkaitan dengan penelitian ini dan diharapkan mampu memberikan konstribusi ilmiah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dan penyusunan proposal disusun menjadi tiga BAB. Di mulai dari BAB I Sampai BAB III. Berisi tentang latar belakang, rumusan

masalah, batasan istilah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembasahasan.

BAB II. Kajian Pustaka. Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang berisi bahan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan data yang hendak di kumpulkan baik dari beberapa litrature buku maupun skripsi dan jurnal online, kajian dalam penelitian ini meliputi: Teori Komunikasi Politik, Komunikasi Politik, Komunikasi Politik dalam Pilkada. Pada bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik yang peneliti jadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini.

BAB III. Metode penelitian. Pada bab ini memaparkan metode yang di gunakan penulis, meliputi: Jenis penelitian, lokasi penelitian dan jadwal penelitian, jenis sumber data, informat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis membahas tentang Profil objek penelitian meliputi gambaran umum tentang KPUD Mandailing Natal, pembahasan dan hasil teori serta menguraikan hasil teori.

BAB V. Penutup dalam pembahasan ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran setelah melakukan penelitian di KPUD Mandailing Natal.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Political Communication Theories

Menurut Stephen W. Little Jhon dan Karen A. Fouss Jilid 2 (2016: 909-915) Teori komunikasi politik menjelaskan proses suatu kearah suatu tujuan, dimana pemimpin yang dipilih dan ditunjuk, media, dan warga publik menggunakan pesan untuk mengkonstruksi makna tentang praktik politik. ketika orang menjalankan kekuasaan dengan dukungan publik, pesan mereka dan interaksinya yaitu cara strategis untuk memengaruhi kebijakan publik. Konseptualisasi tentang siapa yang berkuasa dan bagaimana mereka menjalankan kekuasaannya merupakan konsep yang menonjol dalam teori-teori komunikasi politik. kekuasaan adalah kemampuan aktor politik untuk memperoleh, mempertahankan dan menjalankan otoritas dalam persoalan pemerintahan dan memengaruhi relasi dan kebijakan.

Elit politik (pejabat terpilih, pemimpin partai, anggota dewan, dan direktur kelembagaan) memiliki kekuasaan untuk memengaruhi populasi karena mereka membuat undang-undang dan memberi sanksi atas perilaku, menyampaikan dan menahan tunjangan sosial dan ekonomi pada warga, dan memengaruhi sumber media massa. Kekuasaan warga Negara berasal dari hak hukum, pengetahuan proses politik, serta kemampuan dan kemauan untuk melakukan pertimbangan tentang kebijakan publik. Karena publik sering bergantung pada media massa untuk mendapatkan informasi politik, sumber media menggunakan kekuatan ini sebagian dari agenda mereka untuk memberitahukan kepada orang apa dan bagaimana mesti berpikir tentang pemimpin politik, isu dan kebijakan.

Elit politik adalah wakil kepentingan publik; mereka memberikan berbagai visi dan cita-cita, mempromosikan kebijakan dengan persetujuan dari pihak yang diatur, dan menjustifikasi manfaat kebijakan dengan mengklaim bahwa mereka melayani kepentingan konstituen. Publik mengkonsumsikan bahwa pemerintah akan memperhatikan kebutuhan dan problem dan membuat kebijakan yang bermanfaat. Kesadaran akan kekuasan politik dan warga merupakan salah satu

alasan mengapa sumber media membingkai isu kebijakan dalam tern publik ketimbang kepentingan organisasional atau materiel. Adalah lazim bagi elit politik untuk memasukkan konten pesan mereka dengan justifikasi yang menekankan kepentingan publik. Salah satu tujuannya merupakan untuk menyampaikan publik bahwa wakil pilihan mereka telah bertindak atas nama meraka. Tujuan lainnya lebih samar, ini juga di maksudkan dengan memperkuat kredibilitas persoalan otoritas elit politik.

Komunikator politik menjalankan kekuasaan dan menjaga efek persuasif dengan memilih simbol politik, membuat strategi pesan dan melakukan interaksi yang mengandung tujuan. Sejak 1970-an, riset dalam ilmu politik dan komunikasi telah meminjam dan memperluas konsep dan penjelasan dari konstruksi sosial, pesan dan efek media, dan demokrasi deliberatif untuk menghasilakan teori komunikasi politik.

1. Konstruksi Sosial

Pendekatan konstruksionis berkembang dari interkasi simbolik, teori sosial tentang bagaimana realitas diciptakan oleh orang menggunakan dan merefleksikan simbol-simbol dalam interkasi sosial. Teori ini berasal dari George Herbert Mead dan aplikasi politiknya. Makna simbol politik mengemukakan melalui interaksi sosial dan bergantung pada konten yang diekspresikan melalui pesan lisan,tertulis, visual, dan aural. Memlaui interkasi, orang mengkonstruksi makna yang diambil dari defenisi mereka tentamg situasi politik, reaksi terhadap orang lain pada simbol itu, dan interpretasi swareflektif yang mereka nisbahkan ke simbol dan pesan. Sebagai akibatnya, interkasi simbolik mempromosikan pemahaman diri, pengatahuan sosial dan penjelasn interpretif yang berkaitan dengan teori komunikasi politik.

Aktor–aktor politik memilih simbol yang memperkuat keyakinan sosial tentang bagaimana warga publik membantu pemimpin yang dipilih dan diangkat untuk memecahkan problem publik dan melayani kepentingan publik. Orang yang mengkonstruksi makna realitas politik berdasarkan makna yang ditunjukkan oleh orang lain signifikan (teman dan rekan, sumber media, dan elit politik).

2. Pesan dan Efek Media

Teori komunikasi politik juga diturunkan diriset efek pesan melalui eksperimen yang dikembangkan pada 1960-an dan 1970-an; ini menekankan pada aliran komunikasi kebawah yang menempatkan elite politik diatas dan publik bahwa stuktur kekuasan politik. teori-teori ini mengkonsumsikan bahwa warga negara akan bergantung pada elite politik dan sumber media untuk mendapatkan informasi politik. media memiliki efek besar terhadap audiens politik. Ide ini berubah ketika Paul Lazarfeld dan rekannya mewawancarai warga Erie Country, Ohio pada pemilu 1940. Mereka menemukan kekurangan konsep peluru magis dari efek media yang memandang pesan media sebagai sumber primer dari sikap dan pembentukan opini publik.

3. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan dimana kekuasan berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui perwakilan terpilih. Delibrasi melibatkan diskusi,debat dan pertukaran pendapat anggota publik. Demokasi delibratif menganut cita-cita partisipasi maksimum warga dalam pembuatan keputusan publik ke elite politik, menekankan aliran komunikasi ke atas, dari publik ke elite politik, dan memberdayakan partisipasi publik dalam aksi-aksi warga. Beberapa ciri utama dari proses delibratif, anatara lain penalaran, keterbukaan pada penolakan, reformulasi isu dan argument, dan penciptaan kesepakatan konsensual di antara partisipan.

Teori komunikasi politik menekankan bagaimana konten dan aliran komunikasi antara elite politik, publik, dan media akan menciptakan dan mereflesikan kekuasaan, melayani kepentingan publik dan memprodukasi pesan termediasi dan pesan interpersonal strategis serta menghasilkan interkasi yang relevan dengan mengambil keputusan pemerintah.

B. Komunikasi Politik

Mengingat ide-ide penting dari korespondensi dan budaya, korespondensi politik pada dasarnya juga merupakan bagian dari budaya sosial dan dipengaruhi olehnya. Bersamaan dengan itu, korespondensi politik dapat mengembangkan,

mengikuti, dan mengirim budaya politik, sehingga dengan menunjukkan konstruksi pesan dan contoh korespondensi politik, sehingga dengan menunjukkan desain pesan dan contoh korespondensi politik yang ditimbulkannya, budaya standar dapat dipatahkan. turun. Seperti yang ditunjukkan oleh Rush dan Althoff, korespondensi politik adalah transmisi data penting secara politis dari satu kerangka kerja politik ke kerangka kerja lain, dan antara kerangka kerja sosial serta sistem publik sebagai elemen dinamika sistem politik, dan sosialisasi yang bergantung pada media, partisipasi dan rekrutmen politik.

Singkatnya, unsur-unsur ini dijelaskan pada gambar sebagai berikut :

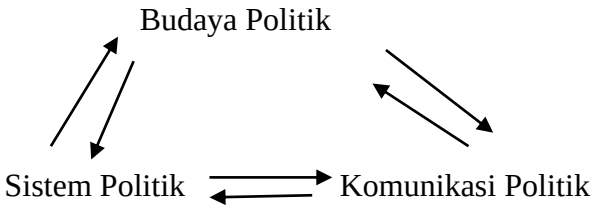

Gambar 1. Unsur-unsur Politik

Sampai saat ini telah banyak defenisi komunisi politik, beberapa diantaranya:

1. Komunikasi politik adalah salah satu fungsi partai politik, yaitu transmisi pendapat dan aspirasi masyarakat yang berbeda dan menyelaraskan mereka dengan cara “menguntungkan” (*interest aggregation*) dan “pembentukan manfaat ”(*interest articulation*).
2. Korespondensi politik adalah penyebaran latihan, saran, atau pesan yang berhubungan dengan batas struktur politik, termasuk bagian-bagian korespondensi, seperti komunikator, pesan, dan lain-lain.
3. Surat menyurat politik adalah surat menyurat yang memuat pesan politik dan pelaku politik, atau berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan teknik pemerintahan.

Peneliti politik mencirikan komunikasi politik sebagi siklus komunikasi politik yang menggabungkan pesan politik dan aktor politik dalam tiap aktivitas kemasyarakatan. Ilmuan komunikasi menganggap media massa adalah saluran komunikasi politik yang urgen. Menariknya, para ilmuan politik menganggap

saluran media massa serta saluran tatap muka untuk mengambil bagian yang sama pentingnya. Ini menyiratka bahwa komunikasi politik dapat dilihat selama waktu yang dihabiskan untuk membuat aturan (*rule making*) atau pemanfaatan kelima dari sistem politik.

Komunikasi mengambil bagian yang sangat besar selama waktu yang dihabiskan untuk membuat pedoman yang berbeda (Undang-undang maupun wujud syarat peraturan yang lain).Pihak yang membuat peraturan dituntut untuk menjalankan kerja sama, ikatan serta komunikasi yang baik antara sesama mereka. Absennya hal-hal tersebut pasti saja hendak sangat membatasi keberhasilan guna pembentuk peraturan. Tak hanya itu, pembuat strategi memang perlu membangun komunikasi dengan warga.

Sebagai Negara dengan sistem demokrasi, suara rakyat harus didengar oleh para penguasa ataupun pengambilan kebijakan. Rakyat memiliki kesempatan untuk menyampaikan tujuan mereka melalui berbagai jenis komunikasi. Selam waktu yang dihabiskan untuk tujuan, komunikasi politik sangat penting dan tidak dapt dipisahkan dari kehadirannya. Tidak hanya itu, pada gilirannya, korespondensi politik tidak dapat dibedakan dari arah dukungan politik. Kerangka kerja berbasis popularitas di Indonesia secara lugas mengontrol interaksi, baik itu badan pembuat undang-undang, presiden/wakil presiden, wakil pimpinan/wakil pimpinan agen, pejabat/pejabat utusan, dan pimpinan/pejabat ketua balai kota, sambil menjaga kontak politik tetap berjalan. Setelah perubahan, proses sosialisasi yang melibatkan percampuran pemimpin yang direncanakan ternyata lebih variatif dan menarik.

Pengemasan kampanye politik kini telah berubah menjadi pengemasan untuk produk makanan atau pakaian. Kamanye politik tidak lagi hanya tentang visi dan misi, tetapi juga memoles calon, membangun pesan dan menyesuaikan kecepatan penampilan media adalah bagian yang perlu besarkan. Jika mereka tidak dapat melakukannya sendiri, para calon akan menyewa sebuah biro periklanan profesional untuk membantu mempersiapkan proses politik. inilah era citra dimana politik tidak puas dengan substansi tetapi juga harus peduli pada citra

karena klaim tentang hak-hak politisi di"jajakan" serta "ditawarkan" kepada publik selaku calon pemilihnya.

Menurut Lely Arrinie, komunikasi politik secara bertahap berubah menjadi riview semakin yang menarik. Sebagai hasil dari bebagai peristiwa, komunikasi politik tidak hanya menarik orang-orang secara akademis memusatkan perhatian dalam ujian media dan politik. Selain itu, korespondensi politik juga penting bagi para aktivis, pejabat pemerintah dan media serta isu-isu politik. Korespondensi politik sebagai ilmu masih baru, khususnya di Indonesia. Jalaluddin Rakhmat di Lely mengungkap bahwa bahkan di Amerika, media politik terus mencari struktur. Meski faktanya terbongkar, isu media dan pemerintahan serta pemanfaatan surat menyurat untuk kepentingan politik sudah ada sejak lama.

Hubungan antara komunikasi luas dan perilaku warga dalam ras telah terkonsentrasi secara luas, terutama oleh peneliti media. Dalam bukunya yang berjudul The Effects of Mass Communication on Political Behavior, Sidney Kraus dan Dennis Davis (1976) berpendapat bahwa komunikasi yang luas berperan penting dalam perlombaan politik. Sejujurnya, seperti yang ditunjukkan oleh mereka, sejak tahun 1950-an di Amerika Serikat, TV telah berkembang pesat dan berhasil menjadikan komunikasi langsung sebagai saluran terpenting untuk menyampaikan informasi politik.

Menurut Lely, sejumlah kajian komunikasi politik juga telah di kembangkan di Eropa yang meliputi kajian opini publik, perkembangan arus sosial budaya, hubungan antara media dan dan pemerintah serta sistem informasi yang berlangsung di birokrasi. Fenomena ini terbukti sangat penting dalam kajian komunikasi politik di Indonesia selama ini. Sebagian besar penelitian media politik cenderung mengambil bentuk penelitian tentang pemungutan suara atau pemberian suara (*voting*), serta pengaruh media terhadap mereka yang menanggapi kampanye secara publik.

1. Unsur-unsur Komunikasi Politik

Dalam komunikasi politik perlu diketahui beberapa unsur dan masing-masing unsur memiliki fungsi yang jelas, sehingga akan terwujudnya fungsi

utama komunikasi politik yaitu tujuan komunikasi menurut Anang (2017: 69-67), dalam komunikasi politik fungsi utama komunikasi dilembagakan sebagai fungsi utama negara menurut sistem politik yang mendasarinya.

a. Komunikator politik

Dalam komuniaski politik didefenisikan sebagai orang-orang yang tergabung dalam organisasi atau perkumpulan partai politik, organisasi yang mengatur media massa dan tokoh masyarakat. Komunikasi politik merupakan bagian integral dari berlangsung proses komunikasi harus memenuhi tiga syarat, yaitu: kredibilitas, yaitu seperangkat presepsi tentang kelebihan yang dimiliki komunikator sehingga dapat diterima oleh publik.

Kedua memiliki daya tarik (attractiveness) yang menjadidaya tarik bagi para politisi status komunikatorlah yang sangat besar pengaruhnya terhadap pemilih. Dan terkahir syarat ketiga komunikator harus memiliki kapasitas yaitu membangun jaringan yang sangat solid dan kekuatan untuk menarik empati publik.

b. Komunikan

Komunikator adalah subjek yang dihadapi oleh komunikator (sumber/kurir) yang mendapat pesan (data baru, pemahaman) sebagai gambaran yang mengandung makna atau kepentingan.

c. Isi (pesan-pesan komunikasi)

Isi komunikasi (pesan) adalah produk subjek setelah mengalami proses pengkodean atau setelah di bangun menjadi lambang-lambang sesuai dengan lingkup kewenangannya.

d. Media komunikasi

Dalam kerangka sistem politik, saran komuniksai apa pun struktur dan sifatnya, melibatkan tempat yang signifikan. Media yang dapat digunakan untuk komunikasi dimulai dari media lama,misalnya media cetak, media elektronik dan media kovensional ke media baru seperti Facebook, Twitter, Instagram, path dan lain sebagainnya.

e. Tujuan dan efek komunikasi

Dampak komunikasi politik membuat pemahaman kerangka kerja politik, atau pengaturan pemerintah dan kelompok-kelompok ideologis yang akan mendorong (suara) dalam pemilihan umum ras prestasi tujuannya, menegaskan bahwa hal itu akan memiliki efek atau dampak yang bertahan lama dengan memberikan masukan. Feedback adalah pelepasan sebagai reakssi atau tanggapan atas interaksi komunikasi yang bermaksud untuk bertemu dengan satu sama lain atau mendapatkan kesepakatan bersama. Dampak dapat sebagai perubahan dalam informasi, mentalitas atau perilaku.

2. Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik

Komunikasi politik dapat dilihat dalam berbagai bentuk. Komaruddin sahid mengatakan bahwa ada tiga bentuk komunikasi politik, yaitu:

1. Opini Publik

Opini publik adalah bentuk komunikasi politik yang bertujuan untuk membentuk citra politik yang di inginkan. Secara defenisi, opini publik gambarkan sebagai proses penggabungan pikiran, perasaan dan saran warga Negara terhadap konflik, ketidaksepakaatan, perselisihan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya (Komaruddin sahid, 2011:250). Opini publik akan memunculkan citra politik pribadi seseorang melalui interprestasi yang akan menghasilkan opini pribadi.

Komaruddin sahid berpendapat bahwa setiap pendapat mencerminkan organisasi yang kompleks yang terdiri dari tiga komponen, yaitu keyakinan, nilai, dan harapan. Dalam komunikasi politik, opini publik terbentuk dari semua pesan dan pidato politik yang menarik perhatian, yang kemudian diolah dan diolah sehingga menjadi pengetahuan dan opini yang terjaga. Hasil dari proses berpikir beikut adalah suatu keputusan pembentuk opini dan kesimpulan.

Melalui perjalanan korespondensi politik, penilaian dapat diubah menjadi penilaian populer yang sesuai dengan kepentingan perkumpulan yang memulai korespondensi politik yang berkelanjutan. opini publik berkembng secara alami ditengah dinamika sosial-politik suatau masyarakat. Opini publik dapat dibentuk oleh kegiatan komunikasi politik, baik yang dilakukan oleh individu maupun

kelompok. Opini publik terbentuk dalam masyarakat akan membentuk citra politik individu dan kelompok yang memprakarsainnya. Jika bentuk opini berhasil menciptakan citra pribadi yang baik, maka akan menunjukkan bahwa citra politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersangkutan telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari publik.

2. Kampanye

Perang Salib pada dasarnya adalah suatu rangkaian latihan korespondensi individu atau kumpulan secara terorganisir dan direncanakan untuk memberikan hasil atau efek tertentu. Roger dan Story mencirikan misi sebagai berikut: pengelompokan kegiatan korespondensi yang diatur dengan niat penuh untuk membuat dampak spesifik pada sejumlah besar subjek yang diselesaikan sementara waktu terus menerus selama periode terntu. Menurutnya, setiap kegiatan kampanye media setidaknya mengandung empat unsur, yaitu: tindakan kampanye yang dimaksud untuk mengahasilkan efek atau dampak tertentu, jumlah tertentu, khalayak sasaran yang besar, sering terkonsentrasi pada periode waktu dan melalui serangkaian peristiwa, tindakan komunikasi yang terorganisir.

Kampanye politik adalah jenis kampanye media yang bertujuan untuk mendapatkan posisi politik melalui pemilihan umum. Hal ini didukung oleh Damsar (2010:226) yang menjelaskan bahwa kampanye politik adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi politik atau calon yang memperebutkan kursi di parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan mayoritas pemilih dalam pemungutan suara.

Menurut Firmansyah, kampanye politik didefenisikan sebagai berikut: kampanye politik adalah jangka waktu yang diberikan KPU kepada semua calon, baik kelompok ideologis maupun orang-orang, untuk menyusun rencana, bekerja, dan memengaruhi penilaian populer dan berkumpul publik untuk memilih mereka dalam jejak pendapat(Firmansyah, 2007:271).

Kampanye ibarat sebuah program kerja yang membutuhkan proses yang panjang, berkesinambungan dan konsisten. Kampanye politik dengan demikian merupakan bentuk komunikasi politik yang direncanakan dimana individu dan

partai politik melakukan upaya yang terorganisir untuk mempengaruhi keputusan publik saat memberikan suara dalam pemilihan umum.

3. Propaganda

Publisitas yang bertujuan dalam masalah legislatif mengambil bagian penting karena merupakan salah satu cara untuk menghadapi pengaruh politik.. Akibatnya, propaganda menggabungkan pesan-pesan politik untuk mencapai pengaruh persuasif. Menurut Bruce L. Smith (dalam Komarudin Sahid, 2011:255), propaganda dipahami sebagai manipulasi yang relatif disengaja dengan menggunakan simbol-simbol (ucapan, sikap, bendera, citra, monumen atau musik) terhadap pikiran atau tindakan orang lain untuk tujuan keagamaan, tujuan, nilai dan perilaku. Sedangkan dalam pengertian umum menurut Komarudin Sahid (2011:255), propaganda dapat diartikan sebagai suatu tindakan manipulasi yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan atau perilaku individu atau negara lain.

Brian McNair (Komarudin Sahid, 2011:257) membagi propaganda berbasis metode menjadi dua kategori, persuasi denan iklan dan persuasi dengan retorika. Iklan politik dianggap sebagai mekanisme konvergen karena menargetkan individu indenpenden dengan tujuan perhatian orang tersebut. Fokus periklanan adalah pada khalayak apa, dengan efek apa, atau media khalayak (audience) dan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan retorika politik adalah proses negosiasi. Tujuan propaganda retoris adalah untuk menciptakan dan memikat publik.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa propaganda adalah serangkaian pesan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi opini atau perilaku publik. Publisitas adalah pekerjaan yang bertujuan dan efisien untuk membuat perhatian, mengendalikan jiwa, dan secara langsung memengaruhi perilaku untuk menciptakan reaksi yang ideal. Akibatnya, publisitas yang disengaja tidak diteruskan secara merata, tetapi memberikan data untuk memengaruhi individu yang mendengar atau melihatnya.

3. Fungsi dan Tujuan Komunikasi Politik

Menurut Anang (2017: 84-94) Ada lima fungsi dasar komunikasi politik, yaitu:

a. Menerangi masyarakat umum mengenai apa yang terjadi di sekitar mereka.
b. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pentingnya dan arti realitas yang sudah ada. Juga mencoba untuk membuat tujuan menjadi inklusi, yang akan menginstruksi individu yang sesuai dengan dunia nyata. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada.
c. Untuk situasi ini, pembuat undang-undang diperlukan untuk mencoba membuat inklusi yang objektif, yang dapat menginstruksikan masyarakat umum tentang kebenaran yang terjadi.
d. Membuat diri kita diakses sebagai tahap untuk mewajibkan isu-isu yang didorong oleh kebijakan, sehingga dapat berubah menjadi pembicaraan dalam bentuk penilaian populer dan memulihkan hasil penilaian umum.
e. Buatlah distribusi fokus pengaturan pemerintah dan politik. Melakukan dukungan yang bisa membantu pengaturan dan proyek organisasi politik dapat digabungkan kedalam media.

4. Saluran-saluran komunikasi politik

Pada dasarnya komunikasi politik yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari peran media massa. Media untuk keadaan saat ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh mana siklus politik dapat dikompilasi, surat kabar, radio dan televisi secara keseluruhan memiliki informasi mengenai isu-isu yang didorong oleh pengaturan untuk lingkungan yang lebih luas. Meskipun subjek luas afiliasi tidak mungkin tidak bisa lebih signifikan, mewarnai kini menjadi pengalih perhatian. Ketika dari pentingnya sebuah asosiasi media, ketika dilihat perasaan sebagian dari aspek jaringan media, saluran komunikasi politik dibagi menjadi:

a. Saluran organisasi
b. Saluran kelompok

c. Saluran media massa
d. Saluran khusus sering digunakan oleh orang atau individu atau kelompok tertentu yang memiliki peran politik.

Pada dasarnya media massa digunakan sebagai saluran untuk mencapai publik yang heterogen dan tak terbatas, meskipun dampaknya sering berputar-putar. Media massa tentunya paling sering digunakan dalam penampilan oleh para politisi sebagai saluran untuk menyebarluaskan jaringan media terkait untuk memperdagangkan arahan politik untuk penguasa politik. Karena selain kemampuannya untuk menggambarkan realitas politik, media juga dapat berpern sebagai indikator siapa yang tidak. Biasanya media massa digunakan sebagai acuan untuk mengetahui opini publik.

5. Peran Media Massa dalam Pilkada

Media massa memiliki tiga fungsi utama yang dibawa sejak lahir dalam pekerjaannya yaitu memberikan data spesifik, menginstruksi dan melibatkan masyarakat umum melalui data media yang membantu orang banyak dengan membentuk persamaan tentang isu dengan memanfaatkan media massa, individu dapat lebih mengembangkan kemampuan, informasi dan belajar tentang kemajuan yang signifikan diberbagai bagian kehidupan.

Demikian pula banyak orang menginvestasikan energi bebas mereka dengan media untuk hiburan. Dalam pengertian ini pengalihan yang sangat bersifat instruktif dan instruktif dalam dunia yang sempurna, media harus memeberikan informasi sebanyak yang mereka butuhkan kepada masyarakat umum untuk membingkai presfektif mereka sendiri dan menetapkan pilihan tentang berbagai bagian kehidupan termasuk masalah sosial, subjek politik seperti diungkapkan Iskandar (2015: 56-57), dalam melaksanakan Pilkada beberapa tahun terkahir, media massa di Indonesia juga diharapkan mengambil bagian penting dalam penguatan politik warga Negara di Negara lain.

Pers tidak hanya diharapakan berhasil dalam menyebarkan data kepada pemilih tentang cara memberikan suara dalam Pilkada, tetapi pada saat yang sama diperlukan informasi untuk memimpin warga, untuk mengajarkan masyarakat tentang pentingnya Pilkada untuk membantu daerah, dan untuk memeriksa

pentingnya Pilkada secara lugas bagi masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu, komunikasi yang luas juga menyambut baik masyarakat umum untuk mengambil bagian dalam siklus politik dalam Pilkada.

C. Komunikasi Politik dalam Pemilukada

1. Pengertian Pemilukada

Keputusan politik pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Indonesia secara keseluruhan baru dilakukan sejak Juni 2005. Menurut pandangan yang sah pengangkatan kepala kepala daerah merupakan amanat langsung dari UUD 1945. Keseluruhan keputusan politik kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepala daerah pasti sering disinggung karena Pemilukada merupakan perlombaan politik memilih kepala daerah dan mengangkat kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk sekitar yang memenuhi persyaratan. Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara yang berminat menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Menunda Pilkada sampai dengan 09 Desember 2020.

Dalam Skripsi Evina (2019: 48-49) pemilihan kepala daerah langsung merupakan wahana demokrasi bagi rakyat dan menerjemahkan aspirasi mereka ke dalam putusan pejabat terpilih di daerah. Pilkada juga merupakan cara untuk terlibat dalam politik. seperti halnya Indonesia, Negara Demokrasi yang telah mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya Orde Baru.

Memilih kepala daerah provinsi dan menetapkan kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh warga RT yang memenuhi persyaratan. Mandailing Natal merupakan salah satu daerah Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara yang gencar menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Untuk Menunda Pilkada Sampai dengan 09 Desember 2020.

Menurut Iskandar (2015; 49) Pilkada masuk kedalam sistem pemilu setelah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama ini dikenal dengan nama Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasangan calon yang dapat mengikuti pemilihan umum kepala daerah tidak hanya pasangan calon dibentuk oleh partai politik yang diusulkan, tetapi juga pasangan calon yang dibentuk oleh partai politik yang diusulakn dari individu.

2. Dasar Hukum penyelengaraan Pemilukada

a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terkahir direvisi dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahankedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, pengukuhan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c. UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu.

3. Memilih Pemimpin dari sudut pandang Alquran dan Hadits

Memilih pemimpin di Negara dan wilayah mana pun harus memiliki tujuan untuk memilih pemimpin berkualitas dan sebagaimana ditunjukkan oleh rakyat. Hal ini sesuai dengan dengan tujuan diselenggarakannya pemilihan pemimpin politik di Indonesia, terlepas dari apakah penetapan pemilihan anggota legislatif, DPD, maupun presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Semuanya bergantung pada pilihan para pemimpin yang memenuhi syarat.

Menurut Iskandar (2015:51) pemimpin politik yang terpilih idealnya adalah yang memenuhi kriteria “ head count” sekaligus “head content”, yaitu pemimpin daerah yang didukung oleh mayoritas pemilih (constituency), sebagai serta memiliki visi misi, desain dan keterampilan mengelola Negara atau daerah dan dan masyarakat (kompetisi). Sedangkan “head content” merupakn visi dasar yang memadu dan menetukan arah pembangunan.

Al-quran telah menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam Islam harus memegang janji untuk menjalankan kekuasan berdasarkan kepentingan umum, artinya kepemimpinan merupakan amanah yang akan di pertanggung jawabkan kepada rakyat yang dipimpin dan juga kepada Allah. Dalam Yusuf (2016: 42) Kepemimpinan menurut Haiman adalah suatu proses di mana seorang memimpin, membimbing, memengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain.

Sementara Suwaidin mengemukkan bahwa kepemimpinana menurut prespektif Islam adalah upaya memobilisasi manusia ke arah tujuan duniawi dan ukhrawi dalam koridor nilai-nilai dan syariat Islam. Kepemimpinan menurut islam yaitu kepemimipinana disebut juga dengan *ulil amri* atau (pemerintah) adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Keberadaan seorang Pemimpin dalam Islam mutlak harus ada rakyat yang patuh dan taat pada pemimpin, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-nisa ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, berserah dirilah kepada Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini menunjukkan bahwa keta`atan kepada ulil amri (pemimpin) harus memerintahkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-rasulnya. Kata “*al-amr*’ pada bagian ini (arti: masalah, persoalan, perintah), menunjukkan bahwa mengurus masalah rakyatnya, memecahkan masalah yang muncul di masyarakat dan dia sistematis, perintah untuk bawahan dan rakyat.

Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/ Markaz Ta`dzhim Alquran berada di bawah bimbingan Syaikh Prof Dr. Imad Zuhair Hafidz, guru besar

Fakultas Alquran di Univeristas Islam Madinah menjelaskan bahwa setelah Allah memerintahkan para pemimpin dan pejabat untuk bersikap adil terhadap rakyatnya, kemudian Allah memerintahkan kepada para pemimpin mereka; Dia berfirman : Taatila Allah sesuai dengan hukumnya, dan patuhi rasul-rasul Allah dari setiap perintah, dan patuhilah orang-orang yang mengatur urusan muslimin, jika tidak ada setuju dengan pemimpin dalam urusan agama maka kembalilah kepada Alquran dan Sunnah, ini merupakan asas dari keimanan serta mengandung kesudahan yang lebih baik bagi kalian di dunia dan akhirat.

Dalam yusuf (2016: 43-45) Kata "*minkum*" dalam ayat ini (yang berarti di antara kalian) mengisyaratkan bahwa pemimpin suatu masyarakat lahir dan muncul dari masyarakat itu sendiri. Pemimpin adalah cerminan masyarakat yang dipimpinnya dan selalu akrab dan bersatu dengan rakyatnya dalam suka maupun duka. Rasulullah saw, sangat menganjurkan kepada umatnya untuk taat kepada pemimpin serta beliau mengecam bagi siapa saja yang tidak taat dan patuh kepada pemimpin. Dalam HR. Bukhori Muslim (2017: 712) Rasulullah saw bersabda:

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آطاعنى فقد أطا ع الله ومن عصا نى فقد عصى الله. ومن يطع ألأمير فقد أطاعني ومن عصي الأمير فقد عصاني

Artinya: Barang siapa yang taat kepada ku, niscaya ia taat kepada Allah, dan barang siapa durhaka kepada Allah, niscaya ia durhaka kepadaku. Barang siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat, niscaya ia telah taat kepada ku. Dan barang siapa yang melanggar pemimpin yang aju angkat , niscaya melanggar aturanku" (HR. Bukhori Muslim)

Dalam hadits lain Rasullah saw. Menyebutkan bahwa pemimpin yang berbuat curang terhadap rakyatnya tidak akan masuk surga, bahkan bau surgapun tidak bisa dirasakan, Sabda Rasullah:

عن معقال بن يسر قال:سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه رعية فلم يحطها بنصحة الا لم يجد راءحة الجنة (رواه البخاري)

Artinya: dari Mu`qal bin Yasar berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda*:" Tidaklah seorang hamba yang meminta jabatan berupa rakyat*

yang dipimpinnya kemudian ia berbuat kecurangan terhadap rakyatnya, kecuali ia tidak mendapatkan baginya surga". (HR.Bukhori).

Pemimpin yang diberikan amanah oleh rakyat dan pemimpin itu tidak berbuat adil, tidak amanah, bahkan otoriter dalam memimpin negara, maka pemimpin seperti itu tidak akan bisa mencium bau surga apalagi dimasukkan kedalam surga

D. Penelitian Terdahulu

Dalam acuan dan pembanding penelitian terdahulu ini sangat penting di sajikan dalam penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah di lakaukan oleh peneliti terdahulu. Untuk itu ada beberapa hasil penelitian yang di cantumkan, yaitu:

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Taufik Hamonangan (2016) dengan judul "Partisispasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015". Jenis penelitian yang di lakukan adalah dengan penelitian lapangan *(Field Research)* yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dilapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Pada skripsi Taufik ini dia hanya fokus pada informant pemilih nya saja kemudian wawancaranya cuman itu saja sehingga data tidak terlalu panjang dan hasil temuannya pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal di kecamatan Panyabungan kurang antusias banyaknya hak suara dari pemilih yang tidak menggunakannya (47%) dan faktor penghambat bagi pemilih dalam berpartisipasi karena kurangnya ketidaksadaran politik, kurangnya pendidikan serta ketidakpercayaan pemilih terhadap calon kandidat.

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Husnul Isa Harahap selaku Dosen FISIF USU (2015) dengan judul "Politik Uang dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 Di Kabupaten Mandailing Natal". Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif (Descriptive research). Penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih

detail mengenai suatu gejala atau fenomena dengan penekanan metode gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif serta menggunakan teknik *purposive sampling.* Hasil dari gambarannya umum partisipasi pemilih di Kabupaten Mandailing Natal pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 persentasi pemilih tinggi dan sedang di lihat dari keseluruhan angka persentase 75%.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin (2020) dengan judul "Pemanfaatan Media Massa Oleh Calon Bupati Mandailing Natal untuk Memperoleh Dukungan Masyarakat Di Pilkada 2020". Jenis penelitian yang yang di lakukan peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan media massa sangat perlu guna memperoleh dukungan masyarakat dan cenderung sifatnya mendukung karena media massa bisa dijadikan sebagai alat untuk kampanye politik serta Cukup layak untuk membantu ubiquity dan elektabilitas pelamar sekaligus memperluas kuantitas suara di setiap ras politik kepala teritorial.

Persamaan dari antara penelitian di atas, membahas pemilihan kepala daerah Mandailing Natal dan lokasi penelitian sama-sama di Kabupaten Mandailing Natal namun ada perbedaan dari ketiga penelitian di atas peneliti menggunakan teori komunikasi politik, peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung di KPUD Mandailing Natal dan Masyarakat dalam studi komunikasi politik.

Dapat diketahui bahwa penelitian pertama yang di lakukan oleh Taufik dia fokus pada partisipasi pemilihnya saja, dalam penelitiannya dia menggunakan metode *File research* atau penelitian lapangan dari hasil termuannya pada pemilihan kepala daerah kabupaten Kabupaten Mandailing Natal kurang antusias karena banyak hak suara yang tidak dipergunakan (47%). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Husnul Isa Harahap dia meneliti dua kecamatan yakni kecamatan panyabungan kota dan kecamatan batang natal dalam penelitiannya ia menekankan metode menggunakan metode gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Dari hasil temuannya bahwa partisipasi pemilih di Kabupaten Mandailing Natal persentase partisipasi masyarakat pemilih yaitu tinggi dan sedang dan peran

keberadaan politik uang merupakan salah satu faktor dalam memengaruhi banyak pemilih akhirnya menerima uang. Dan pada penelitian terkahir yang di lakukan oleh Zainal Abidin dia lebih menggunakan penelitian kualitatif fokus pendekatan deskriptif, ia mengatakan baha pemanfaatan media massa sangat di perlukan dalam hal kampanye politik.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Deskriptif (Descriptive Research), penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.

Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (Dr. H. Halim & Dr. Haidir. 2019:29-49) digunakan untuk mengkaji kondisi obyek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali data deskriptif selengkap mungkin dalam bentuk berikutnya, atau dari data tertulis lain yang mendukung kepentingan peneliti. Temuan penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya data yang diperoleh daripada proses generalisasi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif (deskriptif research) dengan pendekatan kualitatif ini untuk memahami makna dibalik data yang diperoleh dari penelitian ini Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Mandailing Naal Di Kec. Panyabungan Tahun 2020 (Studi Komunikasi Politik).

B. Lokasi penelitian dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Mandiling Natal salah satu nya KPUD Mandailing Natal dan masyarakat, alasan peneliti untuk meneliti disini karena ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, saat sosialisasi KPU menggunakan media seperti apa untuk menarik perhatian masyarakat maupun pesan-pesan pilkada yang di sampaikan KPU yang melibatkan kelompok referensi dalam pemilihan kepala daerah serta mengambil data-data yang di perlukan untuk di teliti.

Adapun jadwal yang digunakan peneliti untuk meneliti di lakukan dengan kurun waktu 2 bulan yaitu Oktober-November. Satu bulan pengumpulan data dan

satu bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk proposal dan bimbingan langsung.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal																				
2.	Penyusunan Istrumen Penelitian																				
3.	Mulai masuki Lapangan																				
4.	Proses Pengumpulan Data																				
5.	Analisis Data																	1			
6	Membuat Hasil Laporan Penelitian																				

C. Jenis sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, pertama, Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus di kumpulan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa wawancara secara langsung dengan pihak masyarakat dan pihak KPUD Mandailing Natal dan, sehingga di peroleh keterangan yang lengkap mengenai partisipasi masyarakat dalam komunikasi politik.

Kedua, Data sekunder itulah sumber informasi eksplorasi yang didapat oleh para ahli secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh berbagai pertemuan). Informasi tambahan sebagian besar berupa buku, catatan yang telah diatur dalam file terdistribusi. Untuk situasi ini, informasi tambahan yang diambil adalah mengenai profil KPU Mandailing Natal dan catatan yang terkait dengan percakapan pilihan eksplorasi.

D. Informant Penelitian

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari informant, penetapan informant dengan menggunakan *purposive sampling* atau sampling bertujuan. Dalam penelitian ini informant yang di ambil menjadi sampel adalah informant salah satu KPUD Mandailing Natal dan Masyarakat yang menggunakan hak pilih.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk membantu dan penelitian ini adalah pertama wawancara mendalam (in depth interview) yang dilakukan secara lansung atau tatap muka dengan informan, kedua observasi dan ketiga dengan dokumentasi. Agar dapat mempermudah proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa panduan wawancara penelitian, alat rekam, lembar catatan observasi serta studi dokumen dilakukan untuk memperkuat data yang dikumpulkan.

F. Teknik Analisis Data

Sugiono menyatakan bahwa analisis informasi adalah proses mencari dan menyusun informasi secara sistematis. Miles dan Huberman (Hardani dan dkk, 2020:167-171) mengemukakan bahwa ada 3 langkah dalam analisis informasi, yaitu:

1. Reduction Data (Reduksi data)

Redusi data didefinisikan sebagai proses memilih, memfokuskan, memperhatikan penyederhanaan, abstraksi dan trasformasi data yang muncul dari catatn lapangan. Redukasi data terjadi secara terus menerus selama penumpulan data. Reduksi data adalah bagian dari analisis yang menyaring, menggolongkan, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak perlu, dan mengatur data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan divertifikasi.

2. Data display (penyajian data)

Penyajian Milles dan Huberman adalah sekumpula informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk kesimpulan dan tindakan. Dalam penelitian kulaitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk bentuk uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, *flowcard* dan jenis-jenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang di pahami.

3. Penarikan Simpulan dan Vertifikasi

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan yang merupakan substansi hasil penelitian yang menggambarkan pendapat terkahir berdasarkan uraian keputusan sebelumnya yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Kesimpulan yang ditarik harus konsisten dengan tujuan penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitian dijelaskan dan dibahas. Ingatlah baha kesimpulan penelitian bukanlah ringkasan penelitian. Dengan demikian, kesimpulan penelitian kualitatif dapat menanggapi rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin tidak, karena, seperti yang telah disebutkan, rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang seiring penelitian dilapangan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data yang dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk menetapkan keabsahan data yang di perlukan teknik pemeriksaan yaitu pertama dengan cara *uji kreabilitas* menggunakan Tringulasi data. Penelitian dalam penelitian kualitatif pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode dan berbagai waktu. Yang kedua dengan cara *uji dependability* dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Peneliti harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian mulai dari menentukan fokus/masalah, memasuki lapangan, mengumpulkan data, sampai membuat suatu kesimpulan benar-benar di lakukan (Dr. H. Salim & Dr. Haidir: 119-123).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum KPU Mandailing Natal

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Mandailing Natal beberapa penting dalam mengawal jalannya demokrasi. KPU Kabupaten Mandailing Natal berdiri tahun 2003 dan terus berbenah agar efesien mungkin dalam menjalankan fungsi dan fungsi kelembagaannya sesuai UU penyelenggaraan pemilu. Komisi pemilihan umum Kabupaten Mandailing Natal adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum setingkat Kabupaten yang bertanggung jawab mengkordinasikan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum di Kabupaten Mandailing Natal.

Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal terletak di jalan merdeka nomor 2, kayu jati, panyabungan. Keanggotaan KPU Kabupaten Mandailing Natal berjumlah lima orang, terdiri dari seorang ketua dan anggota dan empat orang anggota. Dalam melaksanakan tugasnya, komisioner KPU dibidang penyelenggaraan Kabupaten Mandailing Natal dibantu oleh sektariat KPU Kabupaten Mandailing Natal. Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Mandailing Natal yang dibantu oleh empat orang Kepala Sub Bagian dan para staf yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS.

Berdasarkan Undang-undang Penyelenggaraan pemilu nomor 15 Tahun 2011, tugas dan wewenangan KPU pemerintah/kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum, amanat dan wewenang KPU pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan bupati/ walikota dan gubernur, meliputi: Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota (Renstra KPU Madina: 2015: 5).

a. Merencanakan dan mengendalikan tata kerja pejabat/KPU metropolitan, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan pejabat/pimpinan balai kota dengan memperhatikan peraturan KPU atau calon KPU Provinsi.

b. Merencanakan dan menetapkan pedoman khusus untuk setiap tahap pengangkatan pejabat/ketua kota sesuai dengan pengaturan undang-undang dan pedoman.
c. PPK, PPS dan KPPS mempersiapkan pengangkatan wakil pimpinan dan pengangkatan pejabat/ketua kota di daerah fungsinya.
d. Memilah, dan mengendalikan semua tahapan organisasi ras politik berdasarkan pengaturan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan peraturan KPU dan juga KPU Provinsi.
e. Mendapatkan daftar pemilih dari PPK untuk pengangkatan pejabat/ketua kota.
f. Penyegaran informasi ras politik mengingat informasi kependudukan yang dikumpulkan dan disatukan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan informasi keputusan politik terbaru atau berpotensi pemilihan gubernur dan pejabat/ketua kota terbaru dan menetapkannya sebagai daftar warga.
g. memperoleh daftar pemilih dari PPK untuk keputusan politik dalam pemilihan kepala daerah perwakilan dan mengirimkannya ke KPU Provinsi;
h. Penjaminan kemungkinan bagi pejabat/walikota yang telah memenuhi persyaratan.
i. Menetapkan dan menyatakan besaran hasil penghitungan suara untuk pejabat/ketua partai politik berdasarkan jumlah perolehan suara termasuk hasil dari seluruh PPK di rejim/kota yang bersangkutan.
j. Menyiapkan laporan kewenangan penghitungan suara dan menerbitkan surat wasiat penghitungan suara dan menyampaikannya kepada saksi yang berkepentingan dengan persaingan politik, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
k. Penerbitan pilihan KPU Kabupaten/Kota yang mengesahkan konsekuensi pengangkatan pejabat/ketua kota dan menyatakannya.
l. surat pernyataan calon pejabat/ketua kota terpilih dan dibuat laporan kewenangannya;
m. Pengumuman hasil perlombaan politik pejabat/pimpinan balai kota kepada KPU melalui KPU Provinsi.

n. Meninjau kembali usulan Panwaslu Kabupaten/Kota terkait penemuan dan perincian dugaan pelanggaran keputusan politik (Renstra KPU Madina).
o. Pemaksaan persetujuan pengurus dan juga secara singkat merugikan perseorangan PPK dan perseorangan PPS yang terbukti melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu tahapan pengambilan keputusan atas usul Panwaslu Kabupaten/Kota sehubungan dengan Panwaslu Kabupaten/Kota atau berpotensi pengaturan hukum dan pedoman;
p. Sosialisasi pengangkatan pimpinan perwakilan, pejabat dan wali kota serta pelaksana kewajiban KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat luas.
q. Menyelesaikan kewajiban dan tenaga ahli yang berkaitan dengan pengangkatan wakil pimpinan mengingat pengaturan peraturan dan tata tertib KPU maupun KPU Provinsi.
r. Penilaian dan pengumuman pengangkatan pejabat/ketua kota.
s. Menyampaikan akibat persaingan politik pejabat/ketua kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, pejabat/ketua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
t. Melakukan berbagai kewajiban dan tenaga ahli yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, KPU Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 5 (lima) orang diantaranya 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa jabatan KPU Kabupaten Mandailing Natal adalah 5 (lima) tahun, saat ini periode ke empat dengan masa jabatan tahun 2018-2023. Berikut daftar nama anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk masa jabatan 2018-2023:

Gambar 4.1: Susunan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal Periode 2018-2023

Demi kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sebagaimana gambar berikut:

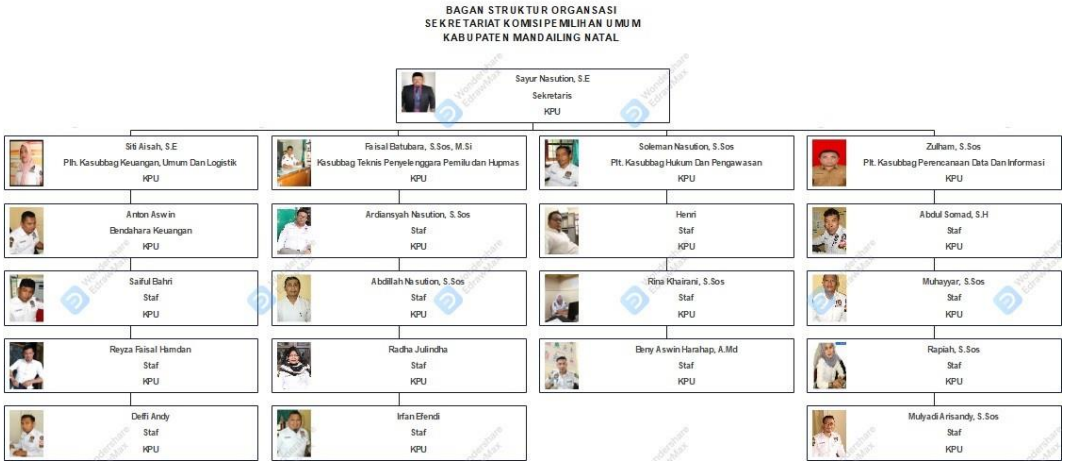

Gambar 4.2: Susunan Anggota Sektariat KPU Mandailing Natal.

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal mengacu pada fungsi administrasi yang didukung oleh kemampuan manajemen dan profesionalisme staf sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008. Dukungan sekretariat sangat penting oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang meliputi:

1. Program untuk mendukung pengolahan dan pelaksanaan tugas-tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU;
3. Program untuk memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan proses politik.

Kelancaran pelaksanaan program di atas tidak lepas dari regulasi lebih lanjut di tingkat Kabupaten Mandailing Natal dengan mengeluarkan peraturan yang mengikat baik internal maupun eksternal terutama pada tahapan pemilihan umum/ memilih kepala daerah. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten Mandailing Natal telah mengeluarkan sejumlah keputusan.

3. Visi dan Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum

a. Visi Komisi Pemilihan Umum:

"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL".

Penegasan visi diatas adalah gambaran yang jelas tentang komitmen KPU untuk mempertahankan pemilu yang jujur, adil, transparan,akuntabel dan mandiri serta berdasarkan mekanisme kerja yang efektif, dan menjungjung tinggi etika dan jabatan professi, integras dan visi nasional. Agar KPU menjadi penyelenggara pemilu yang professional dan handal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, KomisiPemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk turut serta dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik pemilu.

Relevansi **pernyataan** visi Komisi Pemilihan Umumdengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA,yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratisdan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu (Restra KPU Madina: 2015: 24).

b. Misi komisi Pemilihan Umum:

Upaya yang dilakukan untuk memahami visi dan menggambarkan kegiatan yang disesuaikan dengan kewajiban dan elemen Komisi Pemilihan Umum (KPU), misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berubah sebagai berikut:

1. Bekerja pada sifat organisasi ras politik yang kuat dan produktif, lugas, bertanggung jawab, dan tersedia;
2. Bekerja pada kejujuran, kebebasan, keterampilan dan keterampilan luar biasa dari koordinator ras politik dengan memperkuat seperangkat aturan untuk koordinator keputusan politik;
3. Pedoman perencanaan di bidang Pemilihan Umum yang memberikan kepastian hukum, moderat, dan partisipatif;
4. Bekerja pada sifat administrasi ras politik untuk semua mitra;
5. Memperluas penanaman modal dan watak warga negara dalam Pemilu, Pemilih berdaulat negara yang solid; dan
6. Meningkatkan pemanfaatan kemajuan inovasi data dalam pelaksanaan keputusan.

c. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuanyang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasidi Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel (Restra KPU Madina 2015:25).

B. Partisipasi Pilkada Mandailing Natal tahun 2020

Sesuai dari data rekapuitulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal tanggal 26 April 2021 dengan surat keputusan nomor: 724/PY.02-Kpt/12133/KPU-Kab/IV/2021. Pemilihan kepala daerah (PILKADA) Mandailing Natal tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan calon H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi Nst dengan memperoleh 79.156 suara jumlah akhir. Maka pasangan calon H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi Nst yang menjadi Bupati Mandailing Natal periode 2020-2025.

Adapun rincian perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, yakni:

No.	Nama pasangan cabup dan wacabup	Jumlah	Persen
1.	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst Atika Azmi Utammi	79.156	39.0 %
2.	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution H. Aswin	79.002	38.9%
3.	H. M. Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	44.949	22.1%
Total		162.625	100%

Tabel 2: Hasil Perolehan Suara

Menurut data KPU Kabupaten Mandailing Natal, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 299,582 pemilih. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dikabupaten Mandailing Natal, terdapat 1.008 TPS (Tempat pemungutan suara) yang tersebar di 23 kecamatan di seluruh jumlah 404 desa / kelurahan. Sementara partisipasi warga masyarakat Mandailing Natal yang menggunakan hak pilih/suaranya pada saat Pilkada Mandailing Natal sebanyak 202,241 pemilih untuk keseluruhan (Data KPU Madina).

Dari Jumlah 56,142 yang terdaftar dalam pemilih tetap di daerah Kecamatan Panyabungan Kota yang di antaranya jumlah laki-laki sebanyak 27, 311 orang dan jumlah perempuan sebanyak 28,831 orang. Pemilih yang datang ke TPS masing-masing pada hari pencoblosan sebanyak 40, 363 pemilih yang ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya sesuai rincian jumlah laki-laki sebanyak

18,365 orang dan jumlah perempuan sebanyak 21,998 orang yang datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suaranya tingkat partisipasi masyarakat 71.89% sesuai rincian jumlah laki-laki 67.24% dan jumlah perempuan sebanyak 76.30% pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020.

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Yang menggunakan hak suara	18,365	21,998	40,363
2.	Tingkat Pasmas	67.24%	76.30%	71.89%
3.	Jumlah pemilih tetap	27,311	28,831	56,142

Tabel 3: Data Tingkat Partisipasi Panyabungan Kota

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah kerjasama warga Negara biasa dalam memutuskan pilihan apapun menyangkut mereka atau memengaruhi hidup mereka. Partisipasi politik menyiaratkan kepentingan warga Negara biasa (tanpa kewenangan) untuk memengaruhi pembuatan dan pelaksaan keputusan politik. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurutnya, partisipasi politik adalah bentuk partisipasi warga Negara biasa yang tidak memiliki kekuasaan atau kedudukan dalam menentukan proses pelaksaan politik, relevansi dan pengaruhnya dalam partisipasi mereka, dalam skripsi evina (2018:80).

Untuk terkait peningkatan Partisipasi masyarakat tidak terlepas dari kerja sama antara KPUD Mandailing Natal dengan berbagai elemen-elemen yang terlibat aktif untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PILKADA) berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar mudah di terima di tengah masyarakat Mandailing Natal, berbagai program yang dilakukan oleh KPU Madina dan jajaran stakeholder lainnya pada saat sosialisasi diantaranya melakukan berbagai program dalam bentuk kampanye, cermah-ceramah, penerangan khusus kader, agar masyarakat menjadi mengetahui dengan jelas informasi-informasi yang disampaikan.

Sementara partisipasi masyarakat di lihat dari Hasil Rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal sesuai terlaksanakan

penyelenggaraan pemilihan pada tanggal 09 Desember 2020, tingkat partisipasi pemilih mengalami kenaikan kurang lebih menjadi 70% di bandingkan dengan tahun 2015 hanya sekitar 56%, meskipun demikian sebenarnya KPU Madina telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sedikit banyak nya tanggung jawab bukan hanya di KPU saja namun pemerintah, masyarakat dan peserta pemilu itu sendiri (Data KPU Madina).

No.	Tahun	Jumlah pemilih (DPT+DPTb)	Pengguna hak pilih	Tingkat pasmas (%)
1.	2015	331.147	188.684	56,98%
2.	2020	305.549	208.200	68, 14%

Tabel 4: Perbandingan Tingkat Parmas

Alasan masyarakat Mandailing Natal yang ikut berpartisipasi karena adanya dorongan dan kata hati, atau kesadaran dari diri sendiri, ada pula karena suatu hal alasan tertentu atau juga di pengaruh dari beberapa kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam memberikan hak pilihnya sebut saja dari keluarga terdekat sendiri ataupun kelompok referensi seperti kelompok tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Kelompok referensi ini merupakan orang yang berpengaruh dan memiliki peran penting dalam mensukseskan suatu pemilihan di tengah-tengah masyarakat agar masyarakarat ikut berpartisipasi dan mau menyalurkan hak suaranya.

C. Data Informan

No.	Nama	Jenis kelamin	Asal	Keterangan
1.	Fadillah Syarif, S.H	Laki-laki	Pasar Natal, kec. Natal	Ketua KPU Mandailing Natal
2.	Muhammad Husein Lubis, S.E, M.M	Laki-laki	Jl. Syeh Abdul Kadir Mandili 103	Kordinator Divisi Sosial, Pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM.

3.	Muhammad Yasir Lubis Nasution	Laki-laki	Jl. Madrasah No.1 Lingkungan III, kec. Panyabungan	Koordinasi Divisi Hukum dan Pengawasan.
4.	Muhammad Ikhsan, S.Pd.I	Laki-laki	Desa Manyabar, kec. Panyabungan	Koordinasi Teknis Penyelenggara.
5.	Akhir Mada, S.Pd.I	Laki-laki	Simangambat, kec. Siabu	Komisioner Divi Perencanaan data dan Informasi.
6.	Muhammad Azwar Nasution	Laki-laki	Panyabungan II	Masyarakat
7.	Fahri Lubis	Laki-laki	Sipolu-Polu	Tokoh Agama
8.	Hj. Sofyan Edi Saputra Nst.	Laki-laki	Sipolu-Polu	Masyarakat
9.	Mangaraja Erwin Nasution	Laki-laki	Hutasiantar	Tokoh adat
10.	Hj. Alwin Tanjung M.Th	laki-laki	Panyabungan	Tokoh Agama

Tabel 5. Data Informan

D. Pesan Pilkada yang di sampaikan KPU Melibatkan Kelompok Referensi

1. Pengertian Kelompok Referensi

Kelompok acuan atau kelompok referensi merupakan kelompok yang secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung dapat memengaruhi sikap, perilaku, sikap, nilai, norma maupun sebagai sistem acuan bagi individu dalam pengambilan keputusan. Kelompok referensi dapat berupa sahabat, kerabat, tetangga, artis, pemimpin, atau tokoh terkenal, sebuah kelompok acuan juga dikenal sebagai kelompok referensi adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku seseorang.

(kajianpustaka.com: 2021) Kelompok referensi digunakan oleh individu sebagai dasar perbandingan atau acuan untuk membentuk tanggapan afektif, kognitif dan perilaku. Kelompok referensi akan memberikan norma dan nilai yang akan memengaruhi perilaku seseorang. Kelompok referensi dapat berupa apa saja

yang nyata (orang nyata) atau sesuatu yang tidak berwujud atau simbolis (misalnya para eksekutif atau terkenal, politisi,aktor, aktor, olahragawan, dsb).

Menurut Amir (2005), kelompok referensi merupakan orang-orang di sekeliling individu, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Bisa sahabat, kerabat, tetangga, artis pujaan, pemimpin agama, atau figur-figur politik seperti artis dan pimpinan perusahaan yang terkemuka. Sedangkan menurut Sumarwan (2014), kelompok referensi orang yang pengaruhi secara bermakna sikap orang serta membagikan standar (norma) serta nilai yang bisa jadi persfektif penentu mengenai gimana seseorang berpikir serta berperilaku.

Dan pula bagi Kotler serta Keller (2007), kelompok referensi adalah seseorang dari seluruh kelompok mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) ataupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Jalannya suatu sosialisasi yang di lakukan oeh KPU Madina di berbagai lokasi tempat tidak terlepas dari uluran tangan dari berbagai pihak kelompok-kelompok ini tanpa adanya dukungan kelompok ini maka tidak akan jalan suatu pemilihan tersebut. Pihak KPU Madina melakukan beberapa bentuk kegiatan di antaranya sosialisasi dalam bentuk penyuluhan seperti pada segmen pemilih pemula, penyandang disabilitas, segmen kelompok perempuan dan segmen pendekatan kepada kelompok referensi atau tokoh agama untuk memperkokoh atau memperkuat lembaganya guna menghasilkan kinerja dengan baik.

Sehingga tujuan penyelenggara akan sesuai yang diinginkan, dalam membangkitkan perhatian masyarakatnya perlu adanya perencanaan penyampaian pesan yang dapat menarik perhatian yang di tuju, pesan merupakan salah satu unsur penting yang berkaitan dengan tahapan-tahapan pilkada, jadwal, dan program penyelenggaraan pemilihan serta menjalin hubungan sosial dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat aktif untuk berpartisipasi dan ini menjadi priotitas KPU Madina terhadap peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada dalam kegiatan sosialisasi.

Berikut hasil wawancara terkait sosialisasi pilkada dengan menggundang beberapa kelompok yang di libatkan dalam suatu pertemuan yang diadakan di

beberapa lokasi seperti di aula maupun kantor pengurus kelompok, dengan Bapak Muhammad Husein Lubis selaku anggota komisi di KPU Madina bidang SDM, pada hari senin tanggal 16 November 2021 sebagai berikut:

"*Guna mewujudkan pilkada berkualitas perlu tekad bersama seluruh unsur maupun elemen masyarakat yang kita undang dan sosialisasi secara luring tatap muka di berbagai tempat salah satunya di kantor sektariat pengurus cabang NU (PCNU) Mandailing Natal kita berharap begini kita sosialisasi kepada mereka mengajak konstituen mereka karena massa mereka jelas katakan NU, muhammadiyah aswaliyah, persatuan gereja kita sosialisasikan dan kita sampaikan materi tentang kewajiban memilih pemimpin dan haramnya politik uang, kita mengintai pada pimpinan daerah supaya apabila mereka menyosialisikan juga apa yang kita sampaikan bagaimana mendongkrak partisipasi masyarakat atau kita buat tadi, artinya mengajak masyarakatnya agar datang ke TPS, jangan takut datang ke TPS karena sudah tidak jamin bahwa itu adalah posisi aman initnya pesan yang kami sampaikan ini untuk mengajak masyakat untuk berpartisipasi demi kemajuan Kabupaten Mandailing Natal, Alhamdulillah apa yang kami asumsikan pilkada 2020 kemarin ini masyarakatnya sangat antusias dalam pemilihan kepala daerah ini.* ".

Tak hanya itu saja tanggapan lain dari Bapak Fadillah Syarif selaku ketua Umum KPU Madina, pada hari selasa tanggal 17 November 2021,ia mengatakan bahwa:

"*Di samping kita sosialisasi Internal penyelenggara kalau di KPU itukan dan jajarannya kita perintahkan pada jajaran tingkat bawah untuk berkordinasi, dalam sosialisasi dengan kelompok referensi ini, katakanlah tokoh agama/khotib dalam penyuluhan ini kami menyampaikan pesan-pesan yang baik tentang kewajiban memilih pemimpin dan larangan politik uang pesan inilah akan di sampaikan kembali sehingga bisa dikolaborasikan agar apa yang kita harapkan mampu menarik minat masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya*".

Kemudian dengan Bapak Akhir Mada selaku bagian koordinasi divisi perencanaan data dan informasi, pada hari selasa tanggal 17 November 2021 dia mengatakan bahwa:

" *Untuk itu memang kita ajak kerja sama karena kita juga melaksanakan sosialisasi keseluruh ormas-ormas yang ada di kabupaten Mandailing Natal sebagai perpanjang tangan KPU untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat supaya ikut berperan aktif menggunakan hak pilihnya pilkada 2020".*

Tak hanya itu saja tanggapan dari Bapak Muhammad Yasir selaku bagian koordinasi divisi hukum dan pengawasan, pada hari senin tanggal 16 November 2021, dia mengatakan bahwa"

"*Pasti ada, kita ada menjadwalkan dulu, misalnya sosialisasi ke ormas, kita kumpulkan ormas-ormas semua mulai dari kalangan keagaamaan,kedaerahan, mahasiswa. Dulu disini adanya NU, Muhammadiyah, Aswaliyah, Persatuan Gereja, HMI, PMII, IMM dan lain-lain. Semua ormas yang kita tahu ada disini ada terdaftar kesumbag limnas itu kita undang, ada spesi kita siapkan waktu dan jadwal khusus untuk ormas-ormas yang kita harapkan pengurus-pengurus ormas inilah nanti yang menyosialisasikan keanggota masing-masing".*

Kemudian dengan Bapak Muhammad Ikhsan selaku bagian koordinasi divisi teknis penyelenggaran, pada hari senin tanggal 16 November 2021, dia mengatakan bahwa:

" Tentu kalau kerja sama kita kerja sama semua dengan stakeholder di Masyarakat seperti sosialisasi kepada kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok organisasi kemasyarakatan dan juga ada di pilkada 2020 itu mungkin ".

Dari pernyataan di atas yang telah disampaikan semua informan penelitian dapat diketahui bahwa dengan adanya sosialisasi secara luring atau tatap muka dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat baik itu kelompok referensi, semua stakeholder muapun ormas-ormas yang ada di Mandailing Natal untuk saling bekerja sama demi mewujudkan pilkada yang berkualitas, dengan kata lain saling bekerja sama untuk mendorong dan mendokrak partisipasi masyarakat agar mau menyalurkan hak pilihnya, dan dengan kerja sama inilah dapat memudahkan semuanya dan saling berkaitan untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah ini dengan harapan yang terbaik.

Kerja sama pada dasarnya menunjukkan adanya dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sehubungan dengan penentu untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat turut aktif terhadap menggunakan hak suara pilihnya maka tokoh agama sangat berperan penting dalam menyosialisasikan kembali apa yang disampaikan KPU Madina agar dapat menggerakan partisipasi politik masyarakat dalam suatu hal pemilihan, karena diyakini bahwa tokoh agama lah yang paling di yakinkan dan di teladani tentang hal yang mana benar dan baik.

Dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal keberadaan tokoh agama ini yang akan menjadi tolak ukur dalam membimbing, mengarahkan,

memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menetukan pilihannya, sementara adapun sosialisasi yang dilakasanakan tentunya diberbagai tempat yang ranahnya bukan menjadi aset pemerintah seperti di mesjid-mesjid, di aula, ada juga salah satu tempat warga disipolu-polu bermula 9, berikut ungkapan Bapak Fahri Lubis selaku salah satu tokoh keagamaan dan Bapak Hj. Alwin Tanjung M.Th, pada hari kamis tanggal 19 November 2021 mereka mengatakan bahwa :

" Jelas, apa yang di sampaikan KPU itu kepada kita, kita sampaikan kembali kepada masyarakat supaya bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan di Madina, walaupun itu berbeda pilihan dalam pilkada ini tapi jangan sampai terjadi perpecahan yang penting tujuan sama bagaimana supaya memimpin pemimpin Madina ini adalah pemimpin yang jujur,adil dan bijaksana itu harapan kita, dalam isi ceramah yang kami sampaikan intinya mengajak masyarakat Mandailing Natal berartisipasi aktif memilih pemimpin sesuai agama kita, jangan jangan salah pilih pemimpin karena akan rugi 5 tahun kedepan dan juga hindari yang namanya golput".

Berikut ungkapan Bapak Hj. Alwin Tanjung M.Th salah satu tokoh agama,pada hari kamis tanggal 19 November 2021 mereka mengatakan bahwa :

" ..kemaren waktu khutbah jum`at di mesjid Ismailiyah lintas timur kami meyampaikan dalam hal pemilihan kepala daerah penentu masa depan daerah ini ada di tangan masyarakat maka alangkah baiknya memilih pemimpin yang bisa mendorong perubahan daerah ini dan dalam pemilihan ini godaan yang namanya politik uang itu harus dihindarkan..."

Berdasarkan ungkapan dari informan penelitian di atas dapat diketahui bahwa para tokoh agama menghimbau dan mengajak masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin karena dari pilihan ini akan menentukan nasib daerah nya itu sendiri.

Tak hanya itu saja hasil wawancara terkait pesan PILKADA yang di ungkapkan oleh Bapak Mangaraja Erwin Nasution dari bagas godang Hutasiantar mereka melakukan pertemuan dan berdiskusi membahas tentang bagaimana agar masyarakat Mandailing Natal ikut berpartisipasi dalam menentukan pilihan nya pada PIlKADA 2020 ini, deklarasi tersbut di laksanakan di Sopo Godang

Hutasiantar juga di beberapa tempat seperti Wapres Jl. Lintas timur salah satu cafe di Panyabungan, pada hari minggu tanggal 22 November 2021, :

"*Kami selaku salah satu tokoh adat di Mandailing Natal menginginkan dan berharap kepada seluruh masyarakat mari bersama-sama berpartispasi dan memilih pemimpin yang bisa membawa dan mempercepat perubahan pembangunan Mandailing antal ini kedepannya dan membantu kesejahtreaan kabaputen Mandailing Natal untuk 5 tahun kedepan, siapapun pasangan calon pemimpin yang dipilih kita dukung, harapanna ulang adong perpecahan gara-gara pilkada, istilah filsofilna maroban domu (persatuan dan kesatuan)".*

Juga dengan tanggapan dengan Bapak Sofyan Edi Saputra selaku salah satu masyarakat, pada hari Jum`at 20 November 2021 dia mengatakan bahwa :

" Ada, jadi KPU membuat selebaran kenapa semua agar masyarakat tingkat partisipasi di TPS itu semua dilakukan oleh KPU, kami sebagai tokoh masyarakat ini ikut serta dan sama-sama memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat mari memilih pemimpin yang bisa memajukan daerah kita ini ".

Dari beberapa pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi merupakan mata rantai terpenting antara sistem sosial lainnya karena dalam sosialisai terdapat partisipasi individu dalam kelompok dalam suatu sitem partisipasi. Dalam hal ini segala bentuk yang disampaikan oleh KPU Madina kepad pihak-pihak yang menjadi kelompok referensi tidak terlepas dari yang disebut kerjasama, kerjasama itu sendiri merupakan interaksi sosial antara individu atau kelompok yang bekerja bersama-sama. Masyarakat kabupaten Mandailing Natal akan mengalokasikan hak pilihnya dengan berpartisipasi, memahmi dan mampu menyeimbangkan pilihan terbaik, bekerja sama, berperan aktif dan melaksanakan program pengawasan untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu.

2. Bentuk-bentuk Pengaruh Reference Group

Menurut Sumarwan (2011), ada beberapa bentuk pengaruh dari kelompok acuan atau reference group, antara lain:

a. Pengaruh normatif

Pengaruh normatif merupakan pengaruh dari kelompok referensi terhadap seorang lewat norma-norma sosial yang wajib dipatuhi serta diiringi. Pengaruh normatif hendak terus menjadi kuat terhadap seorang buat mengikuti kelompok

acuan, bila terdapat tekanan kuat buat mematuhi norma-norma yang terdapat, penerimaan sosial, selaku motivasi kuat, serta produk dan jasa yang dibeli hendak nampak selaku simbol dari norma sosial. Seseorang konsumen cenderung hendak mengikuti apa yang dikatakan ataupun dianjurkan oleh kelompok acuan jika bila terdapat tekanan kuat buat mengikuti norma-norma yang terdapat sangsi sosial untuk konsumen yang tidak mengikuti anjuran dari kelompok acuan. Seorang konsumen bisa jadi mempunyai motivasi kuat buat mengikuti sikap kelompok acuannya, sebab terdapatnya kemauan buat diterima oleh kelompok acuan tersebut.

b. Pengaruh ekspresi nilai

Kelompok acuan hendak pengaruhi seorang lewat fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Seseorang konsumen hendak membeli kendaraan ellegan dengan tujuan supaya orang lain dapat memandangnya salaku seorang yang berhasil ataupun kendaraan tersebut bisa tingkatkan citra dirinya. Konsumen tersebut merasa kalau orang-orang yang mempunyai kendaraan elegan hendak dihargai serta dikagumi oleh orang lain. Konsumen mempunyai pemikiran kalau orang lain memperhitungkan kesuksesan seorang dicirikan oleh pemilikan kendaraan mewah, sebab itu dia berupaya mempunyai kendaraan tersebut supaya di tatap selaku seorang yang sudah berhasil.

c. Pengaruh informasi

Kelompok acuan hendak pengaruhi opsi produk ataupun merk dari seorang konsumen, sebab kelompok acuan tersebut sangat dipercaya sarannya, sebab dia mempunyai pengetahuan serta bukti yang lebih baik. Konsumen sering menerima opini orang lain sewaktu membagikan fakta yang bisa dipercaya serta diperlukan realitas kenyataan. Ini merupakan yang sangat nyata kala susah buat memperhitungkan kepribadian merk ataupun produk lewat observasi. (kajianpustaka.com: 2021)

Di nyatakan kembali terkait seberapa pentingkah pelibatan kelompok referensi ini menurut KPU Madina, dari hasil wawancara dari dengan Bapak Muhammad Husein Lubis selaku anggota komisi di KPU Madina bidang SDM, pada hari senin tanggal 16 November 2021 sebagai berikut:

“ *Saya beranggapan bahwa massa yang jelas adalah tentu mereka melaksanakan kebawah, saya berharap partisipasi masyarakat bukan naik ternyata apa yang kita asumsikan ternyata benar naik karena ujung tombak dari pada untuk menyosialisasikan ini saya pikir mereka karena basisnya sangat jelas, katakan lah NU, NU itu kan banyak di Mandailing Natal, kemudian Muhammadiyah, Kristen walaupun sedikit tentukan merekalah kita panggil seperti GAMTI, Persatuan Gereja, kemudian FKUB kita ikuti, bagaimana juga dengan MUI kita sosialisasikan, Kementrian Agama, Pendidikan, Ke Sekola-sekolah dilalui ke SLTA baik swasta maupun Negeri”*.

Tak hanya itu saja tanggapan lain dari Bapak Fadillah Syarif selaku ketua Umum KPU Madina,pada hari selasa tanggal 17 November 2021 ia mengatakan bahwa:

“ *Sangat penting, sangat penting sekali kita masing-masing lembaga, organisasi, sasaran massa nya jadi di kabupaten juga kita kemaren juga melaksanakan sosialisasi ORMAS, OKP, organisasi kemahasiswaan, tokoh-tokoh pendidikan, semua kita libatkan. Alhamdulillah pada saat acara tersebut ya kita menghimbau, mengajak untuk sama-sama memberikan pemahaman menyosialisasikan kepada masyarakat yang ending nya bagaimana supaya partisipasi masyarakat selaku pemilih itu bisa meningkat*”.

Kemudian dengan Bapak Muhammad Ikhsan selaku bagian koordinasi divisi teknis penyelenggaran, pada hari senin tanggal 16 November 2021 dia mengatakan bahwa:

“Sangat penting,berpengaruh karena kelompok-kelompok ini punya komunitas massa kemasyarakatan, mereka punya pengurus, semulai dari tingkat kabupaten dan tingkat desa ada pengurus kan jadi menyampaikan keindu atau di kabupaten tentu mereka juga meminta dari pada mereka untuk menyampaikan kepada ikatan bawah itu jadi dia ada sambung menyambung informasi dengan seperti itu, jadi apa yang kami sampaikan jadi itu sangat-sangat penting sekali kelompok-kelompok seperti itu organisasi-organisasi masyarakat baik LSM dan semua sangat-sangat penting”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa adanya kelompok referensi ini sangat penting dan informasi yang disampaikan sambung menyambung dari KPU ke pengurus bawahan lainnya. Juga dengan tanggapan dengan Muhammad Azwar Nasution selaku masyarakat, pada hari Rabu tanggal 18 November 2021 dia mengatakan bahwa:

“Kalau tidak ada kelompok masyarakat ataupun tokoh-tokoh ini baik pemuda, stakeholder baik tokoh kemahasiswaan, ketokoh pemuda, oranisasi islam, tokoh organisasi masyarakat, kalau tidak ada kelompok ini kemungkinan lebih rendah

lagi hasil pemilu tahun 2020 yang lewat. Jadi adanya kelompok ini mempermudah kinerja KPU, jadi KPU menyosialisasikannya dan kelompok-kelompok organisasi ketokohan supaya partisipasi pemilu pilkada 2020 itu meningkat, itulah kegunaan kelompok-kelompok tersebut".

Juga dengan tanggapan dengan Bapak Fahri Lubis selaku salah satu tokoh keagamaan,pada hari kamis tanggal 19 November 2021, dia mengatakan bahwa :

" Sebenarnya begini pada dasarnya pilkada ini bukan hanya tanggung jawab KPU saja, jelas sangat penting sekali KPU tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai kelompok masyarakat baik itu dari segmen kelompok keagamaan, kelompok masyarakat ataupun kelompok lainnya".

Dari beberapa pernyataan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dapat dapat diketahui bahwa pelaksanaan pilkada belum dapat dilakukan secara maksimal, sehingga kelompok referensi ini sangat berpengaruh dalam menarik perhatian masyarakat atau terhadap hasil hasil dari seluruh proses pengambilan keputusan, bagi masyarakat sendiri,maka posisi dan kedudukan kelompok sebagai perpanjang tangan dari KPU Madina, maka kelompok referensi ini lah yang akan menjadi tolak ukur atau pemicu untuk mengajak dan menghasut, menghimbau masyarakat untuk bersama-sama memilih sesuai dengan harapan pilihan hati nuraninya.

Misalnya, tokoh agama memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk atau membentuk opini publik atau publik yang sehat. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari pertanyaan yang menyesatkan dan penyebaran berita bohong jika selalu di pandu oleh para pemuka agama. Pendidikan dan pembinaan para tokoh agama harus mampu mencerahkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dengan baik dalam Pilkada Kabupaten Mandailing Natal 2020. Tokoh agama sebagai panutan dapat memberikan teladan baik kepada masyarakat agar tercipta suasana yang sejuk selama masa tahapan Pilkada.

Melakukan kerja sama dengan penyelenggara Pilkada mengajak masyarakat untuk tidak menjadi apatis tetapi untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Mandailing Natal untuk lima tahun kedepan.Keikutsertaan tokoh agama sebagai penyelenggara Pilkada sangat membantu KPU Madina menjangkau masyarakat, karena selain menjadi elit lokal

yang menjadi teladan bagi masyarakat, mereka juga turut serta penyelenggara Pilkada. Sementara partisipasi tokoh adat juga di manfaatkan oleh penyelenggara pilkada untuk terlibat dalam hal bersosialisasi.

Peran tokoh adat dalam perpolitikan Kabupaten Mandailing Natal memiliki posisi yang sangat strategis karena dapat menjadi kekuatan politik yang dapat memengaruhi opini publik. Karena kemampuannta memengaruhi masyarakat, para tokoh adat di tantang oleh pasangan calon untuk direkrut menjadi tim kampanye atau setidaknya tim relawan. Mereka dapat memberikan pengaruh terhadap anggota masyarakat yang berada di wilayah adat yang mereka kuasai. Bahkan ketika menjadi rebutan oleh pasangan calon dalam mencari dukungan masyarakat.

Kemampuan tokoh adat untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat tidak sama seperti tokoh agama. Perbedaan pengaruh keduanya terletak pada jangkauan wilayah dari keduanya. Tokoh agama tidak dibatasi oleh batasan wilayah adat tertentu, mereka dapat memasuki semua tempat ibadah di Mandailing Natal. tokoh adat hanya dapat memengaruhi orang-orang diwilayah adatnya, mereka tidak dapat masuk kewilayah tokoh adat lainnya. Namun, tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terlebih lagi pada tingkat keluarga yang bersatu dalam satu Tongkonan. Mereka mengkampanyekan pasangan calon untuk mendapat dukungan dari masyarakat di lingkungannya, terutama keluarga.

E. Media yang digunakan KPU dalam sosialisai Pilkada

Memanfaatkan jaringan media berbeda yang digunakan KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksaan dan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 adalah dasar untuk meningkatkan partisipasi pemilihan yaitu menggunakan media cetak, media elektronik, media sosial, sangat diperlukan dan memberi informasi kepada masyarakat luas tanpa harus bertemu langsung dengan mereka.

Menurut Hafied Cangara (2010: 123) Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada publik, sedangkan konsep komunikasi massa itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk

menyampaikan pesan dari sumber kepada publik seperti surat kabar, film, radio dan televisi. Suatu media dapat disebut media massa jika memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri media massa menurut Cangara antara lain:

a. Bersifat institusional, yaitu departemen pengelola media terdiri dari banyak orang, mulai dari mengumpulkan, mengelola hingga menyajikan informasi.
b. bersifat suatu arah yang berarti bahwa komunikasi yang mapan cenderung tidak memungkinkan dialog antara pengirim dan peneriama. Bahkan ketika ada tanggapan atau respon, seringkali memakan waktu dan tertunda.
c. Luas dan seragam, yang berarti dapat mengatasi hambatan waktu dan jarak, karena memiliki kecepatan. Gerakan yang luas dan simultan,dimana informasi yang ditrasmisikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan.
d. Menggunakan peralatan teknis atau mekanik, seperti radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain.
e. Bersifat terbuka, yang berarti siapa saja dan dimana saja dapt menerima pesan, tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan etnis.

Dalam kegiatan sosialisasi yang lakukan oleh KPU Madina, pemanfaatan media memiliki peran yang sangat penting dalam menyalurkan pesan-pesan informasi komunikasi politik yang di sampaikan oleh KPU kepada masyarakat Mandailing Natal. Misalnya media komunikasi yang digunakan KPU Madina dalam melakukan sosialisasi terkait pilkada pada tahun 2020 adalah menggunakan media elektronik seperti radio swasta yaitu radio Start Fm yang pendengar mayoritas masyarakat Mandailing Natal, media ini digunakan untuk menyiarkan informasi terkait pilkada. Adapun acara yang disiarkan di radio yaitu dialog interaktif yang di isi oleh ketua komisioner dan komisi perencanaan data & informasi sebagai narasumber.

KPU Kabupaten Mandailing Natal juga mengguanakan media cetak dengan membuat spanduk, leaflet, poster, baliho sebagai bahan sosialisasi yang akan di sebar ke masyarakat dan di tempelkan pada tempat-tempat tertentu yang strategis untuk memberikan informasi terkait Pilkada ke masyarakat. Adapun informasi

sosialisasi berupa himbauan golput bukan solusi ayo memilih pada tanggal 9 Desember 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, selain itu menginformasikan tentang apakah masyarakat sudah terdaftar di DPT, politik uang cikal bakal korupsi, dan jadilah pemilih berdaulat negara kuat pilkada damai.

Sementara KPU Kabupaten Mandailing Natal menggunakan media sosial karena media itu merupakan wadah untuk bekerja sama dengan satu sama lain dan dilakukan internet berbasis yang memungkinkan orang untuk antarmuka tanpa realitas. Melalui media online, klien dapat berbicara satu sama lainterhubung saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media berbasis web pada sosialisasi pilkada yang di muat di situs website resmi KPU Madina misal Facebook, twitter yang berisi data informasi terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sosialisasi melalui media online lebih dipusatkan pada potensi inovasi warga yang cerdas, terutama anggota baru milenium dan pemilih pemuda yang memanfaatkan banyak media berbasis web.

Berikut Hasil wawancara terkait sosialisasi Pilkada dengan Bapak Muhammad Husein Lubis selaku anggota komisi di KPU Madina bidang SDM, pada hari senin tanggal 16 November 2021 untuk media yang digunakan saat sosialisasi sebagai berikut:

"*Pertama kami KPU secara kelembagaan memiliki website resmi, agar masyarakat mengetahui segala informasi publik terkait pilkada,seperti di media sosial FB, Twitter, Instagram dan juga kami melakukan sosialisai melaui media massa cetak, seperti surat kabar, menyebar brosur, baleho, leaflet, spanduk yang di pasang di titik tertentu, grebek pasar-pasar, melalui rumah-rumah ibadah dan sosialisasi keliling di menggunakan pengeras suara melalui mobil keliling di tingkat kecamatan, dan menggunakan media elektronik seperti Radio tujuannya itu bahwa kita mau gemahkan kepemilihan ini di masyarakat dan mengajak masyarakat Kabupaten Mandailing Natal untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020*".

Tak hanya itu tanggapan serupa dengan Bapak Fadhilah Syarif selaku ketua umum KPU Madina, pada hari selasa 17 November 2021, dia mengatakan bahwa:

"..tentunya media gunanya kan untuk menerbitkan iklan,kami aktif menggunakan media itu selain daripada sosialisasi secara langsung, kami selaku KPU Madina juga menyebar luaskan informasi Pilkada dengan memanfaatkan berbagai media untuk sosialisasi, baik dalam sosialisasi melalui media cetak

seperti surat kabar, media elektronik seperti FB, Twitter, Instagram, dan website resmi KPU Madina, radio, selebaran bahan,dan lain sebagainya itu semua kita gunakan, gunanya untuk apa? Ya agar masyarakat Mandailing Natal tidak ketinggalan akan informasi yang disebar oleh KPU Madina tersebut".

Kemudian tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Akhir Mada selaku bagian koordinasi devisi perencanaan dan informasi, pada hari selasa 17 November 2021, dia mengatakan bahwa:

" Media sosial yang dipakai yang ada di KPU, ada fb, Twitter, Instagram, kemudian ada lagi memang sosialisasi melalui website KPU Madina, disamping itu juga kita memang, ada bekerja sama dengan pihak ke 3 termasuk yang memiliki media cetak dan media elektronik."

Sama juga dengan tanggapan Bapak Muhammad Yasir selaku bagian koordinasi divisi hukum dan pengawasan, pada hari senin 16 November 2021, dia mengatakan bahwa:

" Media elektronik kita pakai juga, radio, iklan di radio juga kita buat isisnya sama intinya anjuran agar datang memilih, kemudian hari H pencoblosan kemudian ya itu untuk menolak money politik, media cetak maupun media elektronik kita pakai juga, harapan adanya media ini bisa mencakup semua kalangan sesuai profesi maupun mencakup semua kalangan menurut usia."

Kemudian tanggapan Bapak Muhammad Ikhsan selaku bagian divisi teknis penyelenggaran, pada hari senin 16 November 2021, dia mengatakan bahwa:

" secara kelembagaan KPU Madina memiliki website nya ada fb, instagram, twitter yang dibuat dan yang di miliki oleh admin, dan disitu setiap tahaoan demi tahapan bahkan seminar kegiatan-kegiatan yang kami lakukan semua, kami share disana, sehingga informasi publik ataupun informasi terkait pilkada yang dibutuhkan masyarakat apap pun itu bisa dilihat di website, di media sosial dan sebagainya tentu yang paling domian mengajak agar menggunakan hak pilih dan tidak golput dan memilih sesuai hati masing-masing tidak dasar atas paksaaan dan tidak ada unsur hal lain, sehingga memilih dengan terlebih dahulu mempelajari visi misi dan juga calon-calon yang dibantu."

Dari beberapa pernyataan semua informan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sehubungan pada era digital ini sebagai penyelenggara Pilkada KPU Mandailing Natal memanfaatkan teknologi, melakukan sosialisasi menggunakan media konvensional seperti media cetak dan media elektrtonik seperti media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan Website resmi KPU Madina untuk

melakukan penyebaran informasi dan mengajak masyarakat yang mencakup semua kalangan agar mau memilih sesuai hati masing-masing tanpa ada unsur paksaan melain kan dari kesadaran diri terlebih dahulu mengetahui mengenai tahapan pemilu, nama calon kandidat, visi misi calon kandidat dan informasi sosialisasi lainnya, diantaranya:

a. Website yaitu : https://kab-mandailingnatal.kpu.go.id/

b. Akun Facebook: KPU Mandailing Natal

c. Instagram: kpumandailingnatal

d. Twitter: @kpumadina

Beberapa konten yang diupload adalah ajakan untuk "**Datang ke TPS dan Anjuran Menolak Money Politik"**. KPU Mandailing Natal melakukan berbagai bentuk sosialisasi pilkada tahun 2020 di antaranya di lakukan di desa singkuang 1 dan 2 kecamatan muara batang gadis melakukan kampanye keliling kampung dengan begitu kreatif, mereka keliling kampung pakai sepeda motor menggunakan toa dan pakai pakaian adat untuk menarik perhatian masyarakat di desa tersebut.

Sedangkan Mangaraja Erwin Nasution selaku tokoh adat di Mandailing Natal dari bagas godang Hutasiantar, pada hari minggu 22 November 2021, dia mengatakan bahwa:

" saya mengethui informasi itu secara langsung dan juga tambahannya ya betul saya pengguna media juga dan dari berbagai media inilah saya dapat mengetui seputar postingan informasi terkait tentang Pilkada, tentuya adanya website yang di buat KPU Madina ini pun sangat bagus juga dan cocok untuk semua kalangan agar nantinya masyarakat lain juga tidak ketinggalan informasi dan juga untuk kalangan masyarakat yang notabenya pengguna media massa semua kalangan."

Bapak Erwin mengaku ia mengetahui segala bentuk informasi seputar Pilkada tak hanya secara langsung namun ia salah satu pengguna media maka dan dari adanya media ini segala bentuk informasi yang diperoleh dapat membantu nya ditambah adanya website yang dibuat KPU Madina dapat memudahkan semua kalangan mengetahui informasi tersebut. Dengan adanya berbagai media ini dibuat oleh KPU Madina dapat memberikan kemudahan mencakup semua kalangan baik itu politisi, pembisnis dari kalangan sesuai profesi maupun

mencakup semua kalangan, dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 dapat memberikan pengaruh yang cukup efektif untuk masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

F. Pesan Menyentuh Atau Menarik Perhatian Masyarakat

Dalam proses pelaksanaannya, sosialisasi Pemilu merupakan hal terpenting untuk menarik perhatian masyarakat agar mau memilih dalam kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) selain dilakukan diruangan tertutup kegiatan sosial. Sosialisasi juga digunakan di ruang terbuka dengan menggunakan berbagai alat peraga sosialisasi penting untuk melihat efektivitas dari proses kegiatan sosialisasi yang dilakukan terkait dengan momentum pemilu maupun pemilihan baik yang telah, sedang dan akan berlangsung. langkah setiap pesta demokrasi sangat membantu dan berdampak positif tidak hanya peningkatan kesadaran, tetapi juga presepsi masyarakat yang ikut hadir di TPS memberikan hak suaranya pada pemilihan.

Berikut hasil wawancara terkait pesan KPU agar masyarakat tertarik dengan Bapak Muhammad Husein Lubis selaku anggota komisi di KPU Madina bidang SDM, pada hari senin tanggal 16 November 2021 sebagai berikut:

“ *Sebenarnya kita waktu Sosialisasi dilapangan memang sangat-sangat sulit,banyak yang pesimis mula-mula kalau naik mobil masih buka kaca, kemudian kalau sudah jadi tidak akan ada lagi terputus silturrahmi, kemudian saya menggunggah hati mereka dengan bahasa pohon durian yang di tanam oleh ompung kita itu tidak di nikmati oleh beliau, artinya berikan kebaikan yang kita tanam bukan kita nikmati sekarang tapi dinikmati oleh generasi berikutnya. Begitulah demokrasi ini juga saya mengajak mereka ayo ke TPS, perbaikan itu bukan yang sekarang kita berharap kegenerasi berikutnya, mari berpartisipasi aktif untuk datang ke TPS”.*

Bedasarkan hasil wawacara diatas bahwa janganlah mudah menilai hal yang belum tentu benar, ubahlah cara pandang pola pikir kita untuk melihat kedepannya, menetukan demokrasi yang baik untuk daerah ini mari sama-sama berpatisipasi aktif untuk datang ke TPS.

Tak hanya itu saja tanggapan lain dari Bapak Fadillah Syarif selaku ketua Umum KPU Madina,ia mengatakan bahwa:

“ Untuk menarik perhatian masyarakat, menarik simpatik masyarakat petugas dari kita kemaren lalu membuat momen pakaian adat yang berfungsi untuk menarik perhatian masyarakat, menarik simpatik masyarakat, sehingga masyarakat bertanya-tanya ini ada apa? Kenapa harus ada pakaian adat adat, ada iring-iringan kendaraan? Disitulah timbul rasa penasaran dan lain-lain sedikit banyak nya ini berpengaruh antusias dan partisipasi masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawacara diatas dapat diketahui bahwa adanya iringan kampanye sosialisasi menggunakan pakaian adat tentunya dapat membuat masyarakat begitu penasaran dan sangat antusias untuk melihat sehingga ketertertarikan dalam diri masyarakat sedikit banyaknya dapat merubah asumsi masyarakat itu sendiri.

Kemudian dengan Bapak Muhammad Ikhsan selaku bagian koordinasi divisi teknis penyelenggaran, dia mengatakan bahwa:

“Tentu pesta demokrasi KPU ini sebagai penyelenggara tentu setiap tindakan yang berhubungan dengan masyarakat, itu kami akan merebutkan sebuah pesan, misal setiap ada tahapan kami share, setiap ada kegiatan yang melibatkan masyarakat yang kami sampaikan kemasyarakat tentu berkesan kalau dari kami ke masyarakat tentu slogan-slogan ini bisa menjadi daya tarik dan minat untuk datang memilih jangan sampai golput dan sebagainya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam tatanan demokrasi segala bentuk usaha yang dilakukan KPU baik dari segi pengemasan pesan dengan membuat slogan-slogan ataupun informasi yang di bagikan yang dapat memberikan ketertarikan bagi masyarakat.

Kemudian dengan Bapak Akhir Mada selaku bagian koordinasi divisi perencanaan data dan informasi, dia mengatakan bahwa:

“ Pasti ada agar masyarakat berminat karena memang disosialisasikan kami kemaren menetukan pilihan pilkada 2020 akan menetukan madina 5 tahun kedepan”.

Juga dengan tanggapan dengan Muhammad Azwar Nasution selaku masyarakat sekaligus ketua umum forum kewaspadan dini masyarakat Madina, dia mengatakan bahwa:

“*Kita sebenarnya pesannya begini untuk pilkada berikutnya kita berharap mereka melakukan sosialisasi baik partisipasi untuk angka pengakaderan masyarakat, baik yang berpatisipasi bagaimana angka supaya tidak terjadi money politik ini karena kita lihat dibalik efek money politik ini sangat-sangat*

berefek untuk kepemimpinan berikutnya, kalau semua-semua calon-calon ini kepala-kepala daerah Bupati atau DPR kalau semua mengandalkan uang ini akan merusak tatanan demokrasi kita termasuk Mandailing Natal ini yang punya simbol, orang mandailing itu ya punya adat istiadat,mandailing natal punya masyarakatnya religius, yang mencintai kedamaian dan tidak suka yang namanya money politik, itulah harapan kita untuk kedepan bagaimana semua KPU harus langsung jauh-jauh hari harus memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat ini, baik tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pasti semua yang stakeholder yang punya kompoten-kompoten di mandailing natal ini tiga tahun atau dua tahun sebelum hari H pemilihan mereka merangkul tokoh-tokoh ini agar kita bisa pertama yang tadi untuk pengkaderan partisipasi masyarakat dan money politik itu jangan ada lagi Kabupaten Mandailing Natal lagi.

Dalam pernyataan informan diatas dapat diketahui bahwa untuk pemilihan berikutnya di Kabupaten Mandailing Natal, KPU Madina dan jajaran stakeholder tentunya harus lebih efesien lagi untuk melakukan sosialisasi jauh hari sebelum tibanya hari pemilihan guna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat setiap pemilihan selalu ada yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang tentunya bukan rahasia umum lagi. Maka dari itu perlu peningkatan kerja sama agar partisipasi nya baik.

Juga dengan tanggapan dengan Bapak Sofyan Edi Saputra selaku salah satu masyarakat, dia mengatakan bahwa :

“ Rasanya tidak ada, semua itu baik itu panwas pun gak pernah, KPU nya penyelenggara tapi tidak netral, cuman KPU Madina ini seromenial saja baik pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tidak ada teguran hanya sebatas admistrasi saja, kalau perlu KPU Madina sama Bawaslu bikin tindakan diskualifikasi begitu baru ada contoh baik itu pemilihan Bupati, Gubernur dan semuan penyelenggara”.

Dari tanggapan informan penelitian diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilihan perlu teguran dan di perketat oleh penyelenggara KPU Madina dan tindakan agar tidak terus menerus terulang agar demokrasi ini tidak tercemar sebagaimana mestinya.

Juga dengan tanggapan dengan Bapak Fahri Lubis selaku salah satu tokoh keagamaan, dia mengatakan bahwa :

“Harapan yang di sampaikan kami selaku agama itu ya, apa yang di pilih ulama itu, itulah yang menjadi pemimpin mengutamakan pendidikan dan agama atau istilah nya karena Mandailing Natal serambi Makkah pesan dan kesan dari pada harapan tokoh agama dan masyarat itu pemimpinnya harus mengenal

agama dan adat, karena mandailing natal ini adalah negeri beradat taat beribadah.

Dari beberapa pertanyaan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sukses tidaknya penyampaian pesan dalam suatu program secara menarik dan mudah dipahami disesuaikan dengan kebutuhan khalayak sasarannya yang dirancang, disusun dengan bahasa baik dan pengemasan materi yang disampaikan oleh KPU Mandailing Natal harus ringan supaya membangkitkan minat masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Minat merupakan kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak timbulnya hasrat untuk melakukan kegiatan.

Minat dapat menyebabkan seseorang giat melakukan sesuatu yang telah menarik perhatiannya. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada dasarnya berpartisipasi adalah kebebasan berpendapat dan berkelompok Karena partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, masyarakat turut serta memberikan/ ikut serta dalam memberi dukungan suara kepada pasangan calon pada pilkada Mandailing Natal tahun 2020 dalam bentuk kontak/ hubungan langsung dengan penjabat pemerintah.

Dalam hal ini partisipasi politik masyarakat Kabupaten Mandailing Natal pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang lalu adalah keikut sertaan masyarakat dalam memberikan suara hak pilihnya dimana ada yang didasari oleh hati nurani masing-masing, ada melakukan pilihan karena dipengaruhi oleh janji atau imbalan, ada juga karena ikut-ikutan saudara. Keberadaan kelompok referensi yang di sosialisasikan KPU Madina di Kabupaten Mandailing Natal tentunya memiliki pengaruh penting bagi masyarakat karena mampu mempromosikan diri sebagai opinion leader.

Di masyarakat Mandailing Natal, opinion leader sendiri termasuk kelompok refereni ini seperti tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat, dan ormas lainnya. Hal ini terjadi karena kelompok ini memiliki hubungan yang erat antara individu dengan masyarakat, sehigga bentuk komunikasi yang dilakukan oleh kelompok tersebut mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Pengaruh kelompok referensi terhadap keputusan masyarakat dalam pilkada karena massa

nya terlihat jelas bahwa kelompok referensi tampak positif dan signifikan bagi kepeutusan masyarakat Mandailing Natal, baik secara parsiall maupun simulan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan pendekatan reference group akan meningkatkan keperayaan masyarakat Mandailing Natal. Pada umumnya masyarakat memilih diberbagai daerah, mereka tidak secara langsung membuat pilihan pribadi untuk menentukan pilihannya, tetapi mereka mencari informasi yang relevan dari perkumpulan-perkumpulan, bahkan dari para tokoh, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat atau keluarga dan bahkan organisasi.

Biasanya mereka berusaha mencari dan mencocokkan informasi yang mereka terima satu sama lain. Bahkan tidak jarang diantara mereka sepakat untuk bersama-sama memilih pemimpin yang tepat bagi mereka. Faktanya, orang lebih mempercayai informasi dari kelompok mereka sendiri. Dalam hal pengaruh individu lebih kuat dari informasi yang berasal dari iklan. (Tarsisius kana: 539) Penelitian ini didukung oleh teori Kotler (1998) bahwa mayoritas komunikasi manusia adalah verbal. Orang-orang berbicara satu sama lain setiap hari, bertukar ide, bertukar informasi, berkomentar, dan menangani komunikasi lainnya.

Mungkin faktanya pengetahuan konsumen tentang merek produk berbeda adalah karena dari mulut ke mulut, yang selanjutnya di perkuat oleh teori Kotler dan Amstrong (2003) bahwa perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kecil. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung dan dimiliki oleh satu orang disebut kelompok keanggotaan. Sebaliknya, kelompok referensi langsung atau tidak langsung dalam membentuk sikap atau perilaku seseorang. Di dukung oleh KPU Mandailing Natal untuk mensosialisasikan Pilkada 2020 sebagai respon terhadap perkembangan teknologi menggunakan media simpati dan edukasi masyarakat, termasuk media massa, media elektronik dan media cetak. Dengan menggelar acara pembagian spanduk dan baliho ditingkat desa, dengan menggelar dialog interaktif atau di Radio Start FM, KPU Kabupaten Mandailing Natal juga menyosialisasikan Pemilukada 2020 dengan cara komunikasi tatap muka yaitu pemilih pemula, penyandang disabilitas, mencapai kesekolah, masyarakat, sosialisasi keliling di tingkat kecamatan, grebek pasar-pasar, rumah-rumah ibadah.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti uraikan di Bab IV maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal yang dimenangkan oleh pasangan calon urut 2 H. Muhammad Jakfar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi Nst dengan memperoleh 79, 156 suara jumlah akhir. Menurut data KPU Madina tingkat partisipasi pemilih secara umum mengalami kenaikan menjadi 70% di tahun 2020 dibandingkan tahun 2015 hanya 56%, tentunya dalam peningkatan partisipasi masyarakat ini tidak terlepas dari kerja sama antara KPU Madina dengan berbagai elemen-elemen masyarakat yang terlibat aktif untuk mensukseskan penyelenggaran Pilkada ini. Masyarakat ikut berpartisipasi karena adanya dorongan dari hati nuraninya atau dari kesadaran diri sendiri untuk memilih pemimpin yang baik dan bisa membangun kesejahteraaan masyarakat Mandailing Natal untuk 5 tahun kedepan.

Kedua, pesan pilkada yang disampaiakan KPU Madina melibatkan kelompok referensi yaitu kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam menetukan pemilihan yang baik dan benar sebut saja tokoh agama, adanya tokoh agama ini dapat mengingatkan masyarakat agar memilih pemimpin sesuai dengan agama nya, memilih pemimpin dengan sadar dan menghindari yang namanya money politik, begitu juga dengan tokoh adat adanya tokoh adat ataupun tokoh masyarakat. Semuanya memiliki peran penting dalam mensukseskan Pilkada dan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dan mau menyalurkan suaranya pada pemilihan yang di selenggarakan KPU tahun 2020.

Ketiga, pemanfaatan media yang digunakan KPU Madina dalam sosialisasi Pilkada kepada masyarakat luas dapat memberitahukan bahwa segala informasi terkait Pilkada semua disebar di berbagai media yang dimiliki KPU Madina seperti media sosial, media cetak, ataupun media elektronik supaya

masyarakat tidak ketinggalan informasi mengenai tahap pemilu dan informasi sosialisasi lainnya paling tidaknya informasi yang diupload itu berupa ajakan untuk “Datang ke TPS dan Anjuran Menolak Money Politik”.

Keempat, beberapa pesan yang menarik perhatian masyarakat dalam memberikan hak suaranya beberapa program baik dari segi materi, kesiapan yang dibuat oleh KPU Madina mampu membangkitkan minat masyarakat nya dengan bahasa yang mudah di pahami dan disesuaikan dengan sasaran yang dituju.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah di jelaskan sebelumnya, maka dihasilkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini untuk di ambil dari sisi positifnya. Partisipasi masyarakat pada pilkada kabupaten Mandailing Natal di kec. Panyabungan tahun 2020 (studi Komunikasi Politik)

Pertama, KPU Madina harus baik lagi, harus tetap mengedepankan integritas, profesionalitas dan tanggung jawab. Agar tidak terjadi kesalahan lagi untuk kedepannya pada pemilihan selanjutnya perekrutan penyelenggara di tingkat bawah Ethok terutama untuk KPPS, SDM nya perlu di perketat lagi agar tidak terjadi lagi pelanggaran pada waktu hari pencoblosan.

Kedua, untuk masyarakat maupun calon kandidat harus nya kesadaran, pemahan dan kedewasaan dalam menjalankan demokrasi itu perlu di asah dan jangan memenuhi hasrat ambisi politik sehingga menghalalkan segala cara sehingga merusak image perpolitikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arifin, Dr. Anwar. 2011. *KOMUNIKASI POLITIK. Filsafat –Paradigma-Teori-Tujuan- Strategi- dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Azhar, Dr. Anang. 2017. *PENCITRAAN POLITIK ELEKTORAL. Kajian Politik Segitiga PAN dalam Merebut Simpati Masyarakat*. Yogyakara: Atap Buku.

_____. 2017. *KOMUNIKASI POLITIK untuk PENCITRAAN. Konsep, Strategi dan Pencitraan Politik*. Medan: PERDANA PUBLISHING.

Al-asyi, Yusuf Al-Qardhawy. 2016. *KEPEMIMPINAN ISLAM. Kebijakan kebijakan Politik Rasulullah Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah*. Banda Aceh: Penerbit PENA.

Baqi, Muhammad Fu`ad Abdul. 2017. SHAHIH BUKHARI MUSLIM (AL LU`LI WAL MARJAN). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Burgin, Dr. Burhan. 2018. Komunikasi Politik Pencitraan. Jakarta: Prenadamedia Group.

Damsar. Dr. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Prenadamedia Group

Dkk, Hardani SPd. M.Si. 2020. *METODE PENELITIAN KUALITATUF& KUANTITATIF*. Yokyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Deddy Mulyana, 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Haidir& Salim. 2019. *PENELITIAN DAN PENDIDIKAN*. Metode, Pendekatan dan Jenis. Jakarta: Kencana.

Hafied Canggara, 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

J. Setiadi, Nugroho. 2018. Perilaku Konsumen. Jakarta: Kencana.

Josep, 2018. *Partisispasi Politik di Indonesia dan Upaya Pengembangannya*. Jakarta Selatan: INDOCAMP.

Kriyanto, Rachmat, Ph.D. 2006. *TEKNIS PRAKTIS RISET KOMUNIKASI*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. 2016. *Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Mandailing Naal Tahun 2015-2019*

Onong Ujana Efendy, 1993. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra, Aditya Bakti.

Qadaruddin, Dr. Muhammad. 2016. *KEPEMIMPINAN POLITIK Presfektif KOMUNIKASI*. Yokyakarta: Deepublish.

W. Littlejohn, Stephen & Karen A. Foss. 2016. *ENSIKLOPEDIA TEORI KOMUNIKASI POLITIK JILID 2*. Jakarta: KENCANA, cetakan 1.

Zulkarnain, DR. Iskandara. 2016. *KEPERCAYAAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK: TINJAUAN PSIKOLOGI KOMUNIKASI*. Medan: USU Press.

Jurnal, Skripsi

Abidin, Zainal. 2020. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Pemanfatan Media Massa Oleh Bupati Mandailing Natal Untuk Memperoleh Dukungan Masyarakat Di Pilkada 2020*.

Aya, Demianus. *Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada 2010 Di Kabupaten Halmera Selatan.*

Daryono, M. Khoirul Anwar. 2020. *Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kelurahan Sebani.* Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewargenaraan.

Fadly, Muhammad. Dkk. 2016. *Keterlibatan Elit Lokal Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015*. Jurnal Ilmu Komunikasi.

Hasibuan, Evina Al-Af Riani. 2019. *Partisipasi Politik Taruna Dalam Pemilihan Kepala Daerah Padang Lawas Utara 2018 Di Tinjau Fiqh Siyasah (Studi Kasus Ulak Tano).*

Harahap, Husnul Isa. 2015. Penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. *Politik Uang dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Mandailing Natal*.

Hamonangan, Taufik. 2016. Skripsi IAIN Padang Sidempuan. *Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015*.

Muhaling, After. 2013. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Noor, Muhammad. Dkk. 2019. *Analisis Peran Komisi Pemilihan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu 2019*. Jurnal Ilmu Komunikasi.

Kana, Tarsisius. *Pengaruh Kelompok Referensi, Keluarga Dan Komunikasi Pemasaran Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Perguruan Tinggi Universitas Musamaus Merauke.*

Website

Al-Qur`an Digital Surah An-Nisa ayat 59, Departemen Agama 2021

Iskandar. Terkait PSU, Bupati/ Wakil bupati Madina harus dicutikan. Dari https://malintangpos.co.id/berita/ . di Akses 5 September 2021

Mulyadi, Riza. 2020. DPT Pilkada Madina ditetapkan sebanyak 299,582 jiwa. Dari https://sumut.antaranews.com/berita. di Akses 8 september 2021

Syaikh prof. D.r Irmad Zuhair: Tafsir Al-Madinah al-Munawwarah dari https://Tafsirweb.com/1591-quran-surat-An-nisa-ayat 59.html di Akses 13 Juli 2021.

Saputra, Adi 2021. *MK Perintahkan Pilbup Mandailing Natal Sumut diulang di 3 TPS.*dari https://news.detik.com/berita/d-5503161/mk-perintahkan- . di Akses 26 Agustus 2021

Riadi, Mukhlisin 2021. *Kelompok Acuan (Reference Group)- Pengertian, Jenis, Indikator Pengaruh dari* https://www.kajianpustaka.com/. Di Akses 3 Januari 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA

Hari/ Tanggal :
Waktu :
Nama Informan :
Pekerjaan/Jabatan :
Umur :

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal pada pilkada tahun 2020?
2. Bagaimana cara KPU Madina dalam menyosialisaikan Pemilukada di Kabupaten Mandailing Natal?
3. Dalam sosialisasi ini melibatkan siapa saja?
4. Media apa yang digunakan oleh KPU Madina dalam sosialisasi pilkada?
5. Apakah alasan KPU Madina Memilih Media tersebut?
6. Apakah ada pesan-pesan pilkada yang di sampaikan KPU Madina melibatkan kelompok referensi?
7. Seberapa pentingkah kelompok referensi ini untuk berpartisipasi pada pemilukada ini, alasannya apa?
8. Apakah ada pesan yang menyentuh atau menarik perhatian masyarakat ikut pemilukada?

Lampiran 2

DOKUMENTASI

Gambar 3: lokasi penelitian kator KPU Madina

Gambar 4: Ruang Rumah Pintar Pemilu KPU Madina

Gambar 5: Aktivitas peneliti saat melakukan wawancara bersama Ketua Umum KPU Madina

Gambar 6: Aktivitas peneliti wawancara bersama komisioner sosialisasi dan SDM

Gambar 7: Aktivitas peneliti wawancara bersama dua komisioner bidang devisi hukum dan pengawasan dan devisi perencanaan data dan informasi.

Gambar 8: Aktivitas peneliti wawancara bersama komisioner devisi teknis penyelenggara

Gambar 9: Aktivitas peneliti wawancara bersama tokoh agama

Gambar 10: Aktivitas peneliti wawancara bersama masyarakat

Gambar 11: Aktivitas peneliti wawancara bersama masyarakat

SOSIALISASI KEPADA ORMAS DAN OKP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020

Dokumentasi Bentuk Sosialisasi Yang Dilakukan Kepada Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pada Masa Bencana Non-Alam Pandemi Covid-19

BENTUK SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT SUPAYA MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

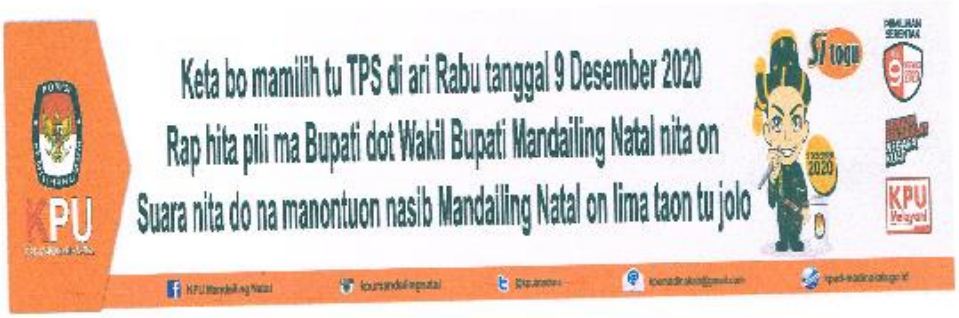

DATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PER KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020

KABUPATEN : **MANDAILING NATAL**
PROVINSI : **SUMATERA UTARA**

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH (DPT + DPTB)			PENGGUNA HAK PILIH			TINGKAT PASMAS (%)			SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL			
1	SIABU	17,200	18,666	35,866	7,986	11,004	18,990	46.43%	58.95%	52.95%	18,721	269	18,990
2	BUKIT MALINTANG	3,892	4,146	8,038	2,452	3,146	5,598	63.00%	75.88%	69.64%	5,438	160	5,598
3	NAGA JUANG	1,551	1,568	3,119	1,017	1,232	2,249	65.57%	78.57%	72.11%	2,166	83	2,249
4	PANYABUNGAN UTARA (PSU)	8,139	8,738	16,877	3,939	5,090	9,029	48.40%	58.25%	53.50%	8,810	219	9,029
5	HUTA BARGOT	2,506	2,750	5,256	1,767	2,322	4,089	70.51%	84.44%	77.80%	3,949	140	4,089
6	PANYABUNGAN KOTA	27,311	28,831	56,142	18,365	21,998	40,363	67.24%	76.30%	71.89%	39,736	627	40,363
7	PANYABUNGAN TIMUR	4,458	4,563	9,021	3,074	3,570	6,644	68.95%	78.24%	73.65%	6,557	87	6,644
8	PANYABUNGAN BARAT	3,386	3,574	6,960	2,009	2,756	4,765	59.33%	77.11%	68.46%	4,688	77	4,765
9	PANYABUNGAN SELATAN	3,421	3,685	7,106	2,378	2,961	5,339	69.51%	80.35%	75.13%	5,254	85	5,339
10	PUNCAK SORIK MARAPI	3,024	3,128	6,152	2,148	2,560	4,708	71.03%	81.84%	76.53%	4,601	107	4,708
11	LEMBAH SORIK MARAPI	3,582	3,691	7,273	2,310	2,805	5,115	64.49%	76.00%	70.33%	5,046	69	5,115
12	TAMBANGAN	3,786	4,068	7,854	2,829	3,413	6,242	74.72%	83.90%	79.48%	6,151	91	6,242
13	KOTANOPAN	9,293	9,809	19,102	6,897	7,995	14,892	74.22%	81.51%	77.96%	14,620	272	14,892
14	ULU PUNGKUT	1,692	1,646	3,338	1,215	1,292	2,507	71.81%	78.49%	75.10%	2,444	63	2,507
15	MUARA SIPONGI (PSU)	3,970	4,013	7,983	3,333	3,552	6,885	83.95%	88.51%	86.25%	6,782	103	6,885
16	PAKANTAN	886	839	1,725	671	632	1,303	75.73%	75.33%	75.54%	1,272	31	1,303
17	BATANG NATAL	8,577	8,341	16,918	6,279	6,708	12,987	73.21%	80.42%	76.76%	12,746	241	12,987
18	LINGGA BAYU	8,047	8,093	16,140	5,083	5,817	10,900	63.17%	71.88%	67.53%	10,424	476	10,900
19	RANTO BAEK	4,536	4,550	9,086	3,073	3,419	6,492	67.75%	75.14%	71.45%	6,241	251	6,492
20	SINUNUKAN	6,492	6,299	12,791	3,531	3,900	7,431	54.39%	61.91%	58.10%	6,909	522	7,431
21	BATAHAN	7,448	7,439	14,887	4,543	5,089	9,632	61.00%	68.41%	64.70%	9,268	364	9,632
22	NATAL	10,115	10,259	20,374	6,498	6,945	13,443	64.24%	67.70%	65.98%	12,843	600	13,443
23	MUARA BATANG GADIS	6,815	6,726	13,541	4,163	4,434	8,597	61.09%	65.92%	63.49%	8,441	156	8,597
	TOTAL	**150,127**	**155,422**	**305,549**	**95,560**	**112,640**	**208,200**	**63.65%**	**72.47%**	**68.14%**	**203,107**	**5,093**	**208,200**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 1185 /PP.07.2/1213/ 2021 Panyabungan, 17 November 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Izin Riset

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B.2731/IS.I/KS.02/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021, perihal Izin Riset atas nama **Nurhikma Hayati** guna untuk menyusun skripsi (karya ilmiah) yang berjudul "*Partisipasi masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal di kecamatan Panyabungan tahun 2020*", Maka bersama ini kami sampaikan Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Per Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, *(sebagaimana terlampir)*.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal

Fadhilah Syarief